

**RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS KESEHATAN
2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat Rahmat dan Ridho-Nya, Penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kinerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 ini dapat disusun. Rencana Kerja disusun berdasarkan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang menjelaskan secara rinci rencana capaian indikator pada tiap-tiap program dan kegiatan yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 – 2026, berdasarkan capaian tahun berjalan .

Ucapan Terima Kasih disampaikan kepada Tim Bappeda Kabupaten Lampung Barat serta Tim penyusun Renja PD Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 yang telah memberi arahan dan masukan dalam penyusunan Renja PD Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat.

Akhirnya kami berharap Renja ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Liwa, 22 Januari 2024
**Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lampung Barat**



Dr. WIDYATMOKO KURNIAWAN, Sp.B
Pembina TK I. NIP 19700626 200501 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GRAFIK	iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023.....	7
A.	Realisasi program/kegiatan/subkegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat yang telah memenuhi target kinerja di tahun 2023.....	7
B.	Realisasi program/kegiatan/subkegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat yang tidak memenuhi target kinerja tahun 2023.....	10
C.	Realisasi program/kegiatan/subkegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang di rencanakan tahun 2023.....	12
D.	Faktor-faktor pendukung dan penghambat tercapainya target kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat tahun 2023.....	13
E.	Implikasi yang ditimbulkan terhadap capaian program Renstra Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat.....	13
F.	Kebijakan perencanaan dan penganggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat.....	13
2.2	Analisis Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat.....	17
A.	Capaian SDGs Sektor Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat	17
B.	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023.....	19
C.	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023.....	20

D. Analisa Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat berdasarkan Norma Standar Pedoman Kriteria (NSPK).....	24
E. Analisa Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023.....	25
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023.....	33
A. Hal kritis yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat.....	33
B. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat.....	34
C. Dampaknya terhadap capaian SPM dan SDGs.....	34
D. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah.....	34
E. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Tahun 2024.....	35
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	35
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	41

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	43
A. Meningkatkan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi	43
B. Percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda.....	44
C. Peningkatan pengendalian penyakit, peningkatan pengendalian penyakit dengan perhatian khusus pada jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker, tuberkulosis, malaria, HIV/AIDS, emerging diseases, penyakit yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa, penyakit tropis terabaikan (kusta, filariasis, schistosomiasis), gangguan jiwa, cedera, gangguan penglihatan, dan penyakit gigi dan mulut.....	44
D. Pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).....	45
E. Penguatan Sistem Kesehatan.....	45

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat.....	53
A. Tujuan.....	53
B. Sasaran.....	53
3.3 Program dan Kegiatan.....	53
A. Faktor - Faktor Yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program Dan Kegiatan	53
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1 Rencana Kerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025	76
BAB V PENUTUP	115

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1.1	T-C.29.Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023.....	14
Tabel 2.2.1	Capaian SDGs Sektor Kesehatan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023...	17
Tabel 2.2.2	Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Kesehatan Tahun 2023.....	19
Tabel 2.2.3	Capaian Indikator Kinerja Utama terhadap target RPJMD 2018 - 2023 Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023.....	20
Tabel 2.2.4	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023.....	22
Tabel 2.2.5	TC 30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat.....	25
Tabel 2.4.1	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Provinsi /Kabupaten/Kota Lampung Barat.....	35
Tabel 2.5.1	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Provinsi/Kabupaten/Kota Lampung Barat.....	40
Tabel 3.2.1	Indikator Sasaran Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023.....	52
Tabel 3.2.1	Capaian SDGs Sektor Kesehatan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023.....	53
Tabel 3.3.2	Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Kesehatan Tahun 2023.....	55
Tabel 3.3.3	TC 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Lampung Barat.....	62
Tabel 4.1.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat TA 2025.....	82
Tabel 4.1.2	Detail Sub Kegiatan Tahun 2025.....	100

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen Rencana Kerja dengan waktu satu tahun yang disusun oleh PD sesuai tugas, kewenangan dan fungsinya guna mengoperasionalkan Renja PD untuk tahun rencana yang dimaksud. Renja PD juga merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah sebagai syarat untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan PD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya.

Renja PD memiliki fungsi yang sangat mendasar dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja PD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah daerah. Renja PD memiliki hubungan langsung dengan pelayanan masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja PD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan tersebut.

Proses penyusunan Renja PD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja PD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan PD untuk menentukan isu-isu penting, penyelenggaraan tugas dan fungsi PD itu sendiri sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Renja PD tahun lalu berdasarkan Renstra PD yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal Rancangan Pembangunan Daerah (RPD). Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja PD, adalah sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Renstra PD dan mengacu pada rancangan awal RPD;
2. Rumusan program/kegiatan di dalam Renja PD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing PD;
3. Penyusunan Renja PD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RPD, serta

merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD);

4. Rumusan program/kegiatan/subkegiatan di dalam Renja PD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing PD;
5. Program/kegiatan/subkegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n+1$.

Keterkaitan Renja PD dengan dokumen RPD dan Renstra PD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja PD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, RPD dan Renstra PD.

Topografi Kabupaten Lampung Barat bervariasi mulai dari dataran rendah hingga tinggi (perbukitan dan pegunungan). Secara astronomis Kabupaten Lampung Barat terletak pada posisi $103^{\circ}35'08''$ - $104^{\circ}33'51''$ Bujur Timur dan antara $4^{\circ}47'16''$ - $5^{\circ}56'42''$ Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Lampung Barat adalah 2064.4 km^2 . Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Lampung Barat memiliki batas-batas : Utara – Kabupaten OKU Selatan, Barat – Kabupaten Pesisir Barat, Selatan – Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Tanggamus, Timur – Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Way Kanan. Akhir tahun 2015, wilayah administrasi Kabupaten Lampung Barat terdiri dari 15 Kecamatan berdasarkan Undang-undang no.22 tahun 2013 daratan masing-masing kecamatan, yaitu : Balik Bukit ($175,63 \text{ km}^2$), Sukau ($223,10 \text{ km}^2$), Lombok Seminung ($22,40 \text{ km}^2$), Batubrak ($261,55 \text{ km}^2$), Belalau ($217,93 \text{ km}^2$), Batu Ketulis ($203,70 \text{ km}^2$), Suoh ($170,77 \text{ km}^2$), Bandar Negeri Suoh ($170,85 \text{ km}^2$), Pagar Dewa ($110,19 \text{ km}^2$), Sekincau ($118,28 \text{ km}^2$), Sumber Jaya ($195,38 \text{ km}^2$), Way Tenong ($116,67 \text{ km}^2$), Air Hitam ($76,23 \text{ km}^2$), Gedung Surian ($87,14 \text{ km}^2$), serta Kebun Tebu ($14,58 \text{ km}^2$). Berdasarkan elevasi (ketinggian dari permukaan laut), dataran di Kabupaten Lampung Barat : $101\text{m}-500\text{m}$: 27,2%, $501\text{m}-1000\text{m}$: 46,9%, $1,001\text{m}$: 25,9%.

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat khususnya di bidang kesehatan memiliki tanggung jawab meningkatkan kesehatan masyarakat di Kabupaten Lampung Barat,

untuk melaksanakan tugas tersebut maka diperlukan sebuah Rencana Strategis Kesehatan serta Rencana Kerja Dinas Kesehatan.

Sasaran Renstra Dinas Kesehatan periode tahun 2023-2026 adalah Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dengan indikator Angka Kematian Ibu/100.000 Kelahiran Hidup, Angka Kematian Neonatal/1.000 Kelahiran Hidup, Persentase Balita dibawah Usia Dua Tahun (Baduta) Stunting, Persentase Case Detection Rate (CDR) TBC Paru dan Persentase Angka Kesakitan Penyakit Tidak Menular (PTM).

Renja PD Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 merupakan sebuah dokumen acuan yang menjadi arah pelaksanaan sebuah kegiatan di tahun 2023. Renja ini memuat program-program yang merupakan wujud nyata dari strategi dalam mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 - 2026. Renja mengacu pada dokumen Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 yang memuat berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 2020 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 - 2024;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 Tentang tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
23. Permenkes Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang

Kesehatan;

24. Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
26. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan RI Tahun 2020 - 2024;
27. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;
28. Surat Edaran Kementrian Dalam Negeri Nomor 906/2114/SJ Tahun 2022 Tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Tahun Anggaran 2022, DBH DR Tahun Anggaran 2022, DBH CHT Tahun Anggaran 2022, Usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes
29. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tanggal 25 Oktober 2019 tentang RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024;
30. Peraturan Gubernur No. 58 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
32. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
33. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 – 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja yaitu sebagai upaya untuk penyampaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PD untuk pencapaian target pembangunan kesehatan yang terinci dalam indicator masing-masing kegiatan sesuai tahapan waktu

pencapaiannya Tahun Anggaran 2024.

Tujuan penyusunan Renja adalah sebagai panduan dalam penyusunan program dan kegiatan dengan memperhatikan rencana anggaran, target indikator output dan outcome setiap kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Rencana kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini mendeskripsikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan dari penyusunan dokumen Renja.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 dan pencapaian target Renstra Dinas Kesehatan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan tahun-tahun sebelumnya, Analisis Kinerja Pelayanan OPD dan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini mendeskripsikan tentang tujuan dan sasaran yang dikaitkan dengan telaahan terhadap kebijakan nasional, Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah serta program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dicapai di tahun 2025.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan seluruh rencana kerja untuk masing-masing sub kegiatan yang telah diidentifikasi dalam percepatan pencapaian indikator kinerja OPD pada tahun 2025 berikut proyeksi sumber pendanaan untuk masing-masing sub kegiatan.

BAB V. PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan atas Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Tahun 2025.

LAMPIRAN

Lampiran berisikan hal-hal yang berkaitan dengan capaian Rencana Kerja Tahun sebelumnya dan Rencana Strategis Tahun 2023-2026 serta Perkiraan Maju Tahun 2026.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja perangkat Daerah tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2023 dilaksanakan berbagai program, kegiatan dan subkegiatan dengan jumlah program termasuk program rutin setelah perubahan sebanyak Lima Program, jumlah kegiatan termasuk kegiatan rutin setelah perubahan sebanyak 25 kegiatan, jumlah sub kegiatan termasuk sub kegiatan rutin setelah perubahan sebanyak 59 subkegiatan. Alokasi dana Tahun 2023 untuk Belanja Daerah setelah perubahan sebesar **Rp. 151.553.511.733** (Seratus Lima Puluh Satu Milyar Lima Puluh Lima Tiga Ratus Juta Lima Ratus Sebelas Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri dari alokasi belanja daerah untuk Dinas Kesehatan beserta UPTD BLUD Puskesmas sebesar **Rp. 105.944.814.401** (Seratus Lima Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu Empat Ratus Satu Rupiah) terealisasi sebesar **Rp. 122.882.196.460** (Seratus Duapuluh Dua Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Empat Ratus Enam Puluh Rupiah.) atau 89,55%. Adapun capaian realisasi subkegiatan sebagai berikut;

A. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja di tahun 2023

Terdapat 38 (Tiga Puluh Delapan.) subkegiatan yang realisasinya telah mencapai 100%, antara lain adalah;

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan indikator kinerja luaran berupa 11 dokumen;
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan capaian 1 Dokumen
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan indikator kinerja 1 Dokumen
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Tahun 2021 memiliki indikator berupa 1 Dokumen;
5. Koordinasi-Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Tahun 2021 telah terealisasi 1 dokumen;
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan indikator kinerja tercapai 2 Dokumen

7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022 telah terealisasi 1 laporan;
 8. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan capaian realisasi fisik 530 orang
 9. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan capaian realisasi fisik 1 Dokumen
 10. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dengan capaian realisasi fisik 1 Dokumen
 11. Koordinasi & Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD telah terealisasi 1 Dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD;
 12. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan telah terealisasi sebanyak 5 Dokumen Lapoan Tanggapan Pemeriksaan
 13. Koordinasi & Penyusunan Lap. Keuangan Bulanan/TW/Semesteran SKPD Tahun 2023 terealisasi 18 laporan keuangan;
 14. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Tahun 2023 Dokumen Laporan prognosis realisasi anggaran terealisasi;
 15. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan capaian realisasi 21 Dokumen Laporan
 16. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Tahun 2023 dengan indikator Penetapan Kinerja Pegawai dan Pelaksanaan Monev dapat
-

dilaksanakan;

17. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Bangunan Kantor Tahun 2023 terrealisasi jenis alat listrik sesuai dengan yang direncanakan sebanyak 9 paket;
18. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Tahun 2023 dengan indikator barang cetak dan penggandaan 9 paket;
19. Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan Tahun 2023 dengan indikator Media Massa Harian yang berlangganan dapat dilaksanakan;
20. Fasilitas Kunjungan Tamu Tahun 2023 indikator berupa pelaksanaan fasilitas kunjungan tamu & Pelaksanaan Rapat Rutin tercapai;
21. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tahun 2023 tercapai;
22. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tahun 2023 dengan indikator jumlah laporan surat keluar dan masuk dapat terlaksana sesuai target;
23. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tahun 2023 terlaksana dengan indikator rek listrik, telepon dan air yang telah dibayarkan sesuai tagihan.
24. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tahun 2023 dengan indikator berupa laporan pelaksanaan penyediaan jasa pelayanan umum kantor dapat dilaksanakan dan dapat dibayarkan sesuai yang direncanakan;
25. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Tahun 2023, indikator berupa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya sebanyak 28 unit telah tercapai.
26. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Tahun 2023 dengan indikator Jumlah Gedung Kantor Yang Direnovasi/rehabilitasi sebanyak 7 unit gedung dapat dilaksanakan;
27. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan indikator Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi sebanyak 15 unit
28. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Tahun 2023 dengan indikator Jumlah Puskesmas menyelenggarakan Pelayanan & Penunjang Pelayanan BLUD sebanyak 15 Puskesmas;
29. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas dengan indikator Jumlah Puskesmas yang dilakukan pemeliharaan sebanyak 9 unit;
30. Rehabilitasi & Pemeliharaan Faskes Lain terdapat 1 unit Puskesmas Pembantu yang direhabilitasi;

31. Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tahun 2023 dengan indikator Jumlah kendaraan diadakan, Jumlah Sarana Pendukung lainnya diadakan (Sumur Bor), dan Jumlah Sarana Pendukung lain (Generator) telah terealisasi sesuai rencana;
32. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Tahun 2023 dengan indikator Jumlah Ibu Hamil mendapatkan Paket Persalinan telah terealisasi;
33. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Tahun 2023 Jumlah Peserta Mengikuti Pertemuan Evaluasi Program Yankes Usia Produktif, Jumlah peserta mengikuti pertemuan Cerdik Jiwa, Jumlah buku saku FR PTM telah terlaksana.
34. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Petugas yang mengikuti peningkatan kapasitas & evaluasi program TBC, Jumlah Monev kegiatan TBC ke Puskesmas, Jumlah Kegiatan konsultasi program & pengambilan logistik telah dilakukan pada tahun 2023 sesuai rencana yang ditetapkan;
35. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Tahun 2023 dengan indikator Jumlah Petugas mengikuti Peningkatan kapasitas & evaluasi program P2 PMS & HIV, Jumlah Monev IMS dan HIV di Puskesmas dan Jumlah kegiatan konsultasi program ke Provinsi Lampung, telah terealisasi;
36. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Tahun 2023 dengan indikator Jumlah Pekon yang sudah ODF, dan Jumlah Pekon dilaksanakan Pemucuan 5 Pilar STBM;
37. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Tahun 2023 dengan indikator jumlah media Cetak melaksanakan promkes, Jumlah radio melakukan promkes, Jumlah TV daerah melakukan promkes, dan jumlah cetak (benner, x banner, stiker dan poster) promkes telah dilaksanakan sesuai rencana kerja;
38. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya Tahun 2023 dengan indikator Jumlah pekon mengikuti lomba asman dan toga dan pelatihan kader kestrad telah dilakukan sesuai rencana;
39. Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus Tahun 2023 dengan indikator Jumlah pelayanan kesehatan calon jamaah haji, dan Jumlah Poskotis Yankes Hari Raya telah tercapai sesuai target;
40. Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan & Pasca Krisis Kesehatan, Penyelenggaraan Kab / Kota Sehat Tahun 2023 dengan indikator

Jumlah penyediaan logistik penanggulangan krisis kesehatan, Jumlah peserta mengikuti pertemuan krisis Konsultasi, Monev ke puskesmas, Jumlah buku Panduan Krisis dan Buku saku telah tercapai;

41. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kab/Kota Tahun 2023 dengan indikator jumlah Puskesmas yang melakukan penilaian reakreditasi;
 42. Pengelolaan Data & Informasi Kesehatan Tahun 2023 dengan luaran dokumen Profil Dinas Kesehatan Lampung Barat;
 43. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan Tingkat Daerah Kab Tahun 2023 dengan indikator SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya tercapai sesuai target;
 44. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan IRT dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi. Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh IRT Tahun 2023 dengan indikator: Jumlah Pelaku Usaha IRTP diberikan bimtek dan Jumlah sarana IRTP dikendalikan dan diawasi dalam rangka pre market telah dilakukan;
 45. Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan dan minuman IRT yang Beredar & Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Tahun 2023 dengan indikator Jumlah sarana PIRT diawasi dalam rangka post market 2. Jumlah Sampel PIRT yang diuji telah dilaksanakan sesuai rencana dan mencapai target.
- B. Realisasi program/kegiatan/subkegiatan yang tidak memenuhi target kinerja tahun 2023
- Dari seluruh subkegiatan terdapat sebanyak 21 (dua puluh satu) subkegiatan yang realisasi fisik atau kinerja keluarannya tidak dapat mencapai mencapai 100% yaitu :
1. kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN khususnya pembayaran insentif tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan COVID-19 dikarenakan turunnya kasus COVID-19 dan perubahan cara perhitungan insentif tenaga Kesehatan ASN;
 2. kegiatan Pendidikan dan Pelatihan pegawai dikarenakan biaya yang ditawarkan tidak sesuai dengan pagu dana yang tersedia;

3. kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dikarenakan Narasumber kegiatan berasal dari internal pemerintah kabupaten Lampung Barat sehingga tidak diberikan honorarium;
4. kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan dikarenakan perbedaan antara harga yang tersedia dengan standar satuan harga pada DPA;
5. kegiatan Pengadaan Obat Vaksin dikarenakan terlambat dan tidak tersedianya beberapa jenis komponen barang pada e katalog dan perbedaan antara harga yang tersedia dengan standar satuan harga pada DPA;
6. kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai dikarenakan terlambat dan tidak tersedianya beberapa jenis komponen barang pada e katalog dan perbedaan antara harga yang tersedia dengan standar satuan harga pada DPA;
7. kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin dikarenakan perbedaan peraturan mengenai pelayanan Jaminan Persalinan sehingga menyebabkan dana tidak dapat terserap;
8. kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak krisis Kesehatan akibat bencana/berpotensi bencana dikarenakan turunnya kasus Covid 19 sehingga tracing yang dilakukan juga menurun dan perbedaan antara harga yang tersedia pada beberapa belanja dengan standar satuan harga pada DPA;
9. kegiatan Pengelolaan Pelayanan Gizi Masyarakat dikarenakan perbedaan antara harga yang tersedia pada beberapa belanja pada hasil survey penetapan Harga Perkiraan Sementara proses pengadaan barang dan jasa dengan standar satuan harga pada DPA;
10. Penilaian dan Penyelenggaraan Kab / Kota Sehat Tahun 2023 tidak terealisasi karna Kabupaten Lampung Barat Tidak Masuk dalam Kualifikasi dan Kategori kabupaten/kota sehat tahun 2023;
11. Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan dikarenakan menurunnya kasus Covid 19 dan Kejadian Luar Biasa lainnya sehingga kegiatan surveilans yang dilakukan juga menurun;
12. kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular dikarenakan terlambatnya pelaksanaan kegiatan akibat penataan DAK Non Fisik oleh Kementerian Kesehatan dan pandemi Covid 19 sehingga beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan;

13. kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat dikarenakan menurunnya jumlah kepesertaan JKN PBI Pusat dan Daerah (45.357 orang) sehingga mengakibatkan nilai kapitasi yang diterima oleh Puskesmas juga menurun;
14. kegiatan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional dikarenakan Laboratorium RSUD AU telah dapat melakukan pemeriksaan PCR dan turunnya kasus Covid 19;
15. kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas dikarenakan realisasi pemakaian listrik dan telephone pada Puskesmas dibawah pagu yang telah dianggarkan pada DPA;
16. kegiatan Operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya dikarenakan terlambatnya pelaksanaan kegiatan akibat Penataan DAK Non Fisik dan efektifitas perjalanan dinas distribusi obat vaksin dan bahan habis pakai dikarenakan dilakukan bersamaan dengan distribusi logistik penanganan Covid 19;
17. kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota dikarenakan ditiadakannya pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan oleh Kementerian Kesehatan selama masa pandemi Covid 19;
18. kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu dikarenakan menurunnya kasus Covid 19 dan selesainya masa pandemi sehingga belanja pelayanan perawatan pasien Covid 19 tidak terealisasi seluruhnya;
19. kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar dikarenakan turunnya kasus Covid 19 dan perubahan cara perhitungan insentif tenaga Kesehatan Non ASN;
20. kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan dikarenakan tidak terpenuhinya kuota tenaga Kesehatan dengan perjanjian kerja bersumber dana DAK Non Fisik dan premi asuransi Kesehatan yang telah dianggarkan untuk tenaga Kesehatan dengan perjanjian kerja tidak dapat direalisasikan karena beberapa tenaga Kesehatan masih memiliki Asuransi Kesehatan sendiri (JKN KIS atau dibayarkan oleh pihak ketiga lainnya);
21. kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dikarenakan terlambatnya pelaksanaan kegiatan akibat penataan DAK Non Fisik oleh Kementerian Kesehatan dan pandemi Covid 19 sehingga beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan;
22. kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota.

- C. Realisasi program/kegiatan/subkegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang di rencanakan tahun 2023

Realisasi program/kegiatan/subkegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2023 tidak ada yang melebihi 100% dan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan pelaksanaan kegiatan

- D. Faktor-faktor pendukung dan penghambat tercapainya target kinerja tahun 2023

1. Faktor pendukung

Adanya komitmen bersama yang kuat dari pimpinan sampai penanggung jawab program/kegiatan/subkegiatan untuk melaksanakan program/kegiatan /subkegiatan yang telah disusun sesuai dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang telah disetujui.

2. Faktor penghambat

Adanya pandemi covid-19 mengakibatkan terbatasnya kegiatan di luar ruangan seperti pertemuan dan mengumpulkan Puskesmas untuk kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan.

Salah satu subkegiatan tidak mencapai target adalah pemberian insentif tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan covid-19, Hal ini disebabkan adanya penurunan kasus covid-19 pada semester kedua tahun 2023 sehingga insentif yang dibayarkan disesuaikan dengan realisasi jumlah penemuan kasus.

- E. Implikasi yang ditimbulkan terhadap capaian program Renstra Perangkat Daerah

Terhambatnya cakupan pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat di tingkat Kabupaten sampai tingkat Puskesmas.

- F. Kebijakan perencanaan dan penganggaran yang harus dilakukan untuk mengatasi faktor penyebab

Program/kegiatan/subkegiatan yang belum tercapai pada Tahun 2023 tetap diajukan sebagai program/kegiatan/subkegiatan di dalam Renja PD pada tahun berikutnya.

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan			
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021		Realisasi renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5	6		7	8=7/6	9	10=(5+7+9)		11=(10/4)
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP OPD	82	poin		81,5	poin	81,5	100%	81,6	81,5	poin	82
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dan disediakan	100	%	100	100	%	100	100%	100	325	%	81
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	100	100	%	100	100%	100	325	%	81
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	%	100	0	%	0		0	25	%	25
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	100	100	%	100	100%	100	325	%	81
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	100	100	%	100	100%	100	325	%	81
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	100	%	100	0	%	0		0	25	%	25
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Dokumen Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disusun dan disediakan	100	%	100	100	%	100	100%	100	400	%	100
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100	%	100	0	%	0		100	25	%	25
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Peningkatan Pelayanan Unit Kerja BLUD	17	unit kerja	0	16	unit kerja	16	100%	16	64	unit kerja	16

1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	89	poin							87	poin	87
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Yankes UKM UKP	100	%	100	100	%	100	100%	100	400	%	100
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SPM	95	%		76	%	76	100%	76	162	%	54
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	12	dokumen		4	dokumen	4	100%	4	14	dokumen	5
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Kabupaten/Kota mendapatkan penerbitan izin	100	%							40	%	40
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Fasyankes memenuhi SDMK sesuai Standart	75	%		90	%	90	100%	90	360	%	90
1.02.03.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	12	dokumen							6	dokumen	50
1.02.03.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	85	%		100	%	100	100%	100	350	%	88
1.02.03.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Tekhnis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Tekhnis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	%	100	100	%	100	100%	100	300	%	75
1.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Sarana Distribusi Serta Produk Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	90	%	90	75	%	75	100%	75	290	%	73
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) mendapatkan penerbitan izin	31	unit							29	unit	50

1.02.03.2.02	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	100	%		100	%	100	100%	100	310	%	78
1.02.03.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	100	%									
1.02.03.2.05	Penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	Persentase Penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	100	%									
1.02.03.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga	Persentase Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga	100	%		100	%	100	100%	100	300	%	75
1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Keluarga berPHBS	50	%		23,8	%	24	100%	23,8	71	%	24
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemintraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Advokasi, Pemberdayaan, Kemintraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	%		100	%	100	100%	100	300	%	75
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif, Preventif Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Persentase Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif, Preventif Tingkat Daerah Kabupaten Kota	100	%		100	%	100	100%	100	300	%	75
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	%		100	%	100	100%	100	300	%	75

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Akuntabilitas kinerja berisikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis kinerja yang secara sistematis menggambarkan tentang keberhasilan dan kegagalan, hambatan dan permasalahan yang dihadapi serta langkah- langkah yang telah diambil. Selain itu, di bab ini juga dijelaskan tentang capaian realisasi anggaran yang digunakan dalam upaya pencapaian target kinerja di setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Di tahun 2023 telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai target pembangunan kesehatan di Kabupaten Lampung Barat sebagaimana yang telah dijabarkan dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat. Untuk mengukur capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang menjadi dasar atau tolok ukur capaian hasil kinerja, evaluasi dan juga pengukuran kinerja dilakukan dengan metode penghitungan berdasarkan capaian kinerja terhadap target per masing-masing sasaran dengan cara kuantitatif.

A. Capaian SDGs Sektor Kesehatan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau yang lebih dikenal sebagai Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan tujuan pembangunan global yang baru menggantikan Millenium Development Goals (MDGs) yang telah berakhir pada tahun 2015. Sustainable Development Goals (SDGs) disepakati oleh 190 negara dan disahkan melalui sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 25 Septermber 2015 di New York, Amerika Serikat. Agenda pembangunan global yang baru ini berlaku mulai dari tahun 2015 hingga 2030. Dalam mendukung capaian SDGs Kabupaten Lampung Barat tahun 2023 memiliki capaian sebagai berikut;

Tabel 2.2.1
Capaian SDGs Sektor Kesehatan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 (tahun 2024 belum ada data)

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2022)	Tahun 2023		Target 2025
					Target	Capaian	
Target 2.1. Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi dan cukup sepanjang tahun							
2.1.1(a)	Prevalensi Balita Kurang Gizi (Underweight)	Dinas Kesehatan	Persen	6,83%	7,80%	10,94 %	7,5
Target 2.2. Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia lima tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula							

2.2.1*	Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak balita	Dinas Kesehatan	Persen	10,97	24	10,94	22
2.2.1(a)	Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta	Dinas Kesehatan	Persen	5,68	7,53	5,12	
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi/ <i>wasting</i> (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	Dinas Kesehatan	Persen (<i>Wasting</i>)	5,43	7,8	7,5	7,5
			Persen (<i>Obesitas</i>)	-	-	-	-
2.2.2(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil	Dinas Kesehatan	Persen	14,32	42	14,95	39
2.2.2(b)	Persentase remaja yang mengkonsumsi <i>Fe</i> (zat besi)	Dinas Kesehatan	Persen	82,95	52	92,2	54
2.2.2(c)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	Dinas Kesehatan	Persen	76,75	45	84,66	50
Target 3.1. Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup							
3.1.1(a)	Kasus Kematian Ibu	Dinas Kesehatan	Kasus	4	6	8	6
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Dinas Kesehatan	Persen	95,22	95	94,29	96
3.1.2(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Dinas Kesehatan	Persen	93,43	93	94,03	94
Target 3.2. Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000							
3.2.1(a)	Kasus Kematian Balita	Dinas Kesehatan	Kasus	16	23	25	21
3.2.2(a)	Kasus Kematian Neonatal	Dinas Kesehatan	Kasus	21	23	20	21
3.2.2(b)	Kasus Kematian Bayi	Dinas Kesehatan	Kasus	3	23	25	21
3.2.2(c)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 Persen imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Dinas Kesehatan	Persen	93,5	95	95,3	95
Target 3.3. Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya							
3.3.2(a)	Angka penemuan kasus TB (semua tipe yang dilaporkan/ <i>case notification rate</i>) per 100.000 penduduk	Dinas Kesehatan	Persen	69,090	172,00	74,8	172
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Dinas Kesehatan	API per	<1	<1	0	<1

			1000 pendu duk				
3.3.3(a)	Angka kesakitan positif malaria (API) per 1.000 penduduk	Dinas Kesehatan	API per 1000 pendu duk	0	0	0	<1
3.3.5(c)	Angka kesakitan (<i>incidence rate</i>) DBD per 100.000 penduduk	Dinas Kesehatan	Incide nce Rate	31,434	<49	2,6	<49
Target 3.4. Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan							
3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Dinas Kesehatan	Kabup aten /Kota	-	-	-	-
Target 3.8. Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang							
3.8.1(a)	<i>Unmet need</i> pelayanan kesehatan.	Dinas Kesehatan	Persen				
3.8.2(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan	Persen		100	78,55	100
3.8.2(b)	Rasio Puskesmas	Dinas Kesehatan	Persen	1,4707	1,4649	1,00	1,00
3.8.2(c)	Jumlah Apotek PRB (Program Rujuk Balik)	Dinas Kesehatan	Apotek	0	1	2	2
Target 3.b. Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai <i>the Doha Declaration</i> tentang <i>the TRIPS Agreement and Public Health</i>, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua							
3.b.1(a)	Persentase ketersediaan obat	Dinas Kesehatan	Persen	100	100	90,86	100

B. Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2023

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintahan Daerah selama 1 tahun anggaran dan membandingkan dengan target yang ditetapkan sebelumnya. SPM pelayanan dasar kesehatan tahun 2023 yang terdiri dari 12 indikator telah dilaksanakan yang hasilnya dapat dilihat pada table 2.2

Tabel 2.2.2
Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Kesehatan Tahun 2023

No	Standar Pelayanan Minimal			Realisasi	KET
	Indikator	Nilai Nasional	Nilai Daerah		
1	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	100	100	98.64	Profil 2022
2	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100	100	24.48	Profil 2022
3	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	79.53	Profil 2022
4	Setiap balita mendapatkan yankes sesuai standar	100	100	100	Profil 2022
5	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	100	99.93	Profil 2022
6	Setiap masyarakat Lampung Barat usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	100	84.08	Profil 2022
7	Setiap masyarakat Lampung Barat usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	100	99.32	Profil 2022
8	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	99.13	Profil 2022
9	Setiap penderita DM mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	97.26	Profil 2022
10	Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	75.78	Profil 2022
11	Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100	100	99.99	Profil 2022
12	Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	100	100	87.09	Profil 2022

Jika dilihat dari tabel capaian SPM diatas terlihat bahwa 12 indikator yang dilaksanakan dalam pelayanan kesehatan belum mencapai target yang telah ditetapkan.

C. Capaian Indikator Kinerja Utama

Tabel 2.2.3
Capaian Indikator Kinerja Utama terhadap target RPJMD 2018 - 2023
Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	67,84	67,65	99,71
2	Angka Kematian Ibu (AKI)	Kelahiran Hidup	110	38.04	165
3	Angka Kematian Bayi (AKB)	Kelahiran Hidup	3,9	2.28	142
4	Prevalensi Balita Stunting	%	10,94	5.29	152
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	86	88.61	103%

Sesuai RPJPMD 2018-2023 dan reuiu Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2023, sehingga Dinas Kesehatan bertanggungjawab dalam pencapaian IKU yang capaiannya dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Pencapaian Usia Harapan Hidup sebesar 99,71% dengan kategori **Kinerja Sangat Baik**, meskipun jika dilihat nilai capaian tersebut belum sepenuhnya seratus persen
2. Pencapaian Target Angka Kematian Ibu di bawah 110/100.000 KH 165 % masuk dalam kategori **Kinerja sangat baik** menjadi indkator bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah di tahun 2023 terkait pelayanan kesehatan ibu hamil dan melahirkan, di Tahun 2023 terdapat 1 kasus kematian ibu di Kabupaten Lampung Barat.
3. Pencapaian target Angka Kematian Bayi sesuai target RPJMD adalah sebesar 3,9/1.000 KH. Meskipun jika disandingkan dengan Renstra Dinas Kesehatan terdapat perbedaan indicator yang ditetapkan yaitu Reuiu Renstra Dinas Kesehatan menetapkan Angka Kematian Neonatus sebagai IKU. Hal ini dilakukan mengingat sebagian besar kematian Bayi (0-12 bulan) terjadi pada masa neonates (0-28 hari) sebagai percepatan upaya untuk menekan, mencegah kematian dengan deteksi, upaya preventif, keterpaduan pelaksanaan dan dengan dukungan penyediaan sarana – prasarana pelayanan kesehatan dalam pencegahan kematian

bayi. Sepanjang tahun 2023 jumlah kelahiran hidup sebanyak 5.258.orang dengan kasus kematian sebanyak 10 kasus dari seluruh kematian bayi, sehingga secara statistik AKB tercatat sebesar 1,1 / 1.000 KH Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan target. Kasus kematian bayi di Lampung Barat secara keseluruhan terjadi pada periode neonatus atau usia 0-28 hari dengan faktor penyebab antara lain Asfiksi, BBLR, kelainan kongenital, aspirasi dan pneumonia sebagai penyebab kematian. Pencapaian indikator AKB sebesar 142, % termasuk dalam

Kategori Kinerja Sangat Baik

Indikator ke-4 yaitu Persentase kasus gizi buruk ditangani tidak di temukan kasus di tahun 2023 Peran serta seluruh komponen internal dan eksternal memiliki dampak yang signifikan dalam penanganan kasus gizi buruk dimana sektor eksternal yaitu pemerintahan pekon ikut berperan aktif dalam pemantauan dan juga pemberian intervensi terkait temuan stunting di wilayahnya yang di buktikan dengan penganggaran intervensi terkait kesehatan minimal 8 % dari jumlah pendanaan APBDes. Hasil pengukuran atas indikator kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat tahun 2023 menunjukan hasil sebagai berikut;

Tabel 2.2.4
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2023

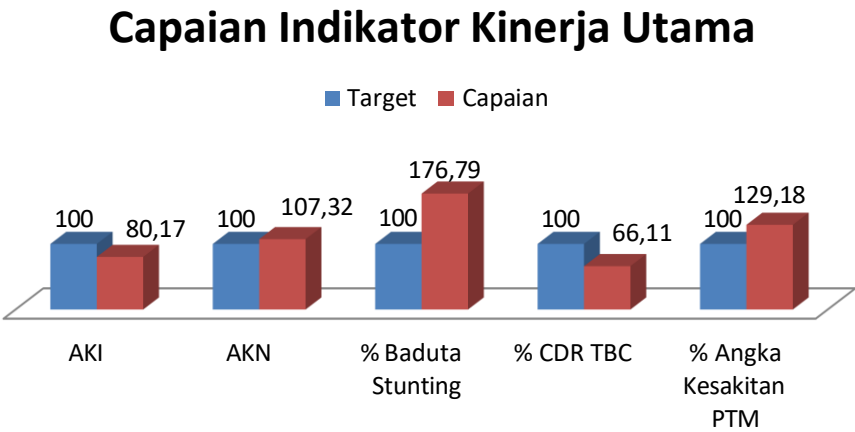
No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Angka Kematian Ibu (AKI)	Kelahiran Hidup	110	38,04	165
2	Angka Kematian Neonatal (AKN)	Kelahiran Hidup	3,9	2,28	142
3	Persentase Baduta Stunting	%	10,49	5,29	152
4	Persentase CDR (Case Detection Rate)	%	71	43,9	61,11
5	Persentase Angka Kesakitan Penyakit Tidak Menular	%	24,8	34	129

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

1. Target Angka Kematian Ibu Tahun 2023 adalah 110/100.000 KH. Pada Tahun

- 2023 AKI Kabupaten Lampung Barat ada 145/100.000 KH dengan nilai capaian 165%, berdasarkan Permendagri nomor 54 Tahun 2010 maka kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat masuk dalam **Kategori Kinerja Sangat Baik**.
2. Target Angka Kematian Neonatal tahun 2023 sesuai RPJMD adalah sebesar 4,1/1.000 KH. Untuk tahun 2023 nilai capaian AKN Kabupaten Lampung Barat adalah 3,9/1.000 KH dengan nilai capaian 142% berdasarkan Permendagri nomor 54 Tahun 2010 maka kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat masuk dalam **Kategori Kinerja Sangat Baik**.
3. Persentase Baduta Stunting Tahun 2023 berdasarkan RPJMD memiliki nilai target 24 %. Berdasarkan nilai Realisasi tahun 2023 Persentase Baduta Stunting Tahun 2023 Kabupaten Lampung Barat adalah 5,29 dengan nilai capaian 152%, berdasarkan Permendagri nomor 54 Tahun 2010 maka kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat masuk dalam **Kategori Kinerja Sangat Baik**.
4. **Persentase CDR (Case Detection Rate) TB Tahun 2023 adalah 71%. Pada Tahun 2023 capaian Persentase CDR TB Kabupaten lampung Barat adalah 43,39 dengan nilai capaian 61,11 %, berdasarkan Permendagri nomor 54 Tahun 2010 maka kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat masuk dalam **Kategori Kinerja Kurang**.**
5. Persentase Angka Kesakitan Penyakit Tidak Menular Tahun 2023 adalah 34%. Pada Tahun 2023 realisai angka kesakitan penyakit tidak menular Kabupaten Lampung Barat adalah 24,08 dengan nilai capaian 129,18 %, berdasarkan Permendagri nomor 54 Tahun 2010 maka kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat masuk dalam **Kategori Kinerja Sangat Baik**.

Grafik 2.2.1
Target dan Realisasi Pencapaian Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan



Tabel TC 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Target Renstra Perangkat daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Nilai SAKIP OPD	82	poin	81,5	81,5	81,7	81,8	81,5	81,5	81,7	81,8	
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dan disediakan	100	%	100	100	100	100	100	100	100	100	

1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	1	1	100	100	1	1	100	100	
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	%	1	1	100	100	1	1	100	100	
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	1	1	100	100	1	1	100	100	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	1	1	100	100	1	1	100	100	
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	100	%	0	0	100	100	0	0	100	100	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Dokumen Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disusun dan disediakan	100	%	1	1	100	100	1	1	100	100	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100	%	1	1	100	100	1	1	100	100	

1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Peningkatan Pelayanan Unit Kerja BLUD	17	unit kerja	15	15	16	16	15	15	16	16	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	89	Poin	100	100	86	87	100	100	86	87	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Yankes UKM UKP	100	%	54	54	100	100	54	54	100	100	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SPM	95	%	1	1	80	85	1	1	80	85	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	12	dokumen	45	45	3	3	45	45	3	3	

1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Kabupaten/Kota mendapatkan penerbitan izin	100	%	0	0	100	100	0	0	100	100	
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Fasyankes memenuhi SDMK sesuai Standart	75	%	90	90	60	65	90	90	60	65	
1.02.03.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	12	dokumen	100	100	3	3	100	100	3	3	
1.02.03.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	85	%	100	100	70	75	100	100	70	75	

1.02.03.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Tekhnis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Tekhnis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
1.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Sarana Distribusi Serta Produk Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	90	%	65	65	75	80	65	65	75	80	
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) mendapatkan penerbitan izin	31	Unit			28	29			28	29	

1.02.03.2.02	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	100	%	150	150	100	100	150	150	100	100	
1.02.03.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	100	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
1.02.03.2.05	Penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	Persentase Penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	100	%	0	0	100	100	0	0	100	100	

1.02.03.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga	Persentase Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga	100	%	0	30	100	100	0	30	100	100	
1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Keluarga berPHBS	50	%	82	68	35	40	82	68	35	40	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemintraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Advokasi, Pemberdayaan, Kemintraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	%	175	183	100	100	175	183	100	100	
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif, Preventif Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Persentase Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif, Preventif Tingkat Daerah Kabupaten Kota	100	%	60	62	100	100	60	62	100	100	

1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	%	0	0	100	100	0	0	100	100	
--------------	--	---	-----	---	---	---	-----	-----	---	---	-----	-----	--

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Dinas Kesehatan melakukan pemetaan atas isu-isu penting yang menjadi fokus penyelenggaraan tugas dan fungsi tersebut agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan optimal, efektif dan efisien. Pada periode saat ini, adanya pandemi covid-19 adalah faktor yang paling berpengaruh dalam pencapaian target kinerja yang diharapkan. Namun demikian kondisi-kondisi lain seperti sosial dan budaya, stigma masyarakat atas kasus-kasus kesehatan tertentu serta kondisi politik juga merupakan hal penting yang harus di antisipasi.

A. Hal kritis yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat sebagai berikut;

1. Masih tingginya kasus kematian Ibu dan Bayi pada tahun 2023;
2. Rendahnya cakupan balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar tahun 2023;
3. Rendahnya cakupan skrining kesehatan sesuai standar pada masyarakat usia 15 s.d. 59 tahun pada Tahun 2023;
4. Rendahnya cakupan pelayanan kesehatan sesuai standar pada masyarakat usia lanjut pada Tahun 2023;
5. Rendahnya cakupan pelayanan kesehatan hipertensi Tahun 2021;
6. Masih adanya Stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak balita dan anak baduta tahun 2023;
7. Masih adanya kasus anemia pada ibu hamil tahun 2023;
8. Keterbatasan akses pelayanan kesehatan utamanya yang berkaitan dengan pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat akibat masih adanya pandemi Covid-19;
9. Konsentrasi saat ini lebih pada pencegahan, penanganan & penanggulangan Covid-19;
10. Adanya penonaktifan kartu peserta JKN PBI Pusat dengan jumlah yang cukup signifikan;
11. Situasi Politik dalam masa transisi sehingga dapat mempengaruhi kebijakan publik;
12. Penambahan UPT Dinas Kesehatan Lampung Barat yaitu RSUD Alimuddin Umar pada tahun 2022.

B. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan dan fungsi Dinas Kesehatan.

1. Keterbatasan sumber daya manusia kesehatan.
2. Keterbatasan rekrutmen tenaga untuk memenuhi kebutuhan.
3. Akses pelayanan terhadap masyarakat yang harus terus diperbaiki.
4. Dukungan sistem informasi komunikasi yang belum merata di seluruh wilayah

kabupaten.

5. Upaya promotif dan preventif yang belum optimal pada penyakit menular dan tidak menular.
6. Di Kabupaten Lampung Barat hanya ada satu Puskesmas dengan layanan PONED.
7. Terbatasnya Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

C. Dampaknya terhadap capaian SPM dan SDGs

Terkait adanya masalah dan hambatan yang ada, mengakibatkan capaian indikator SPM dan SDGs di Kabupaten Lampung Barat belum optimal.

D. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah

Indikator SPM dan SDGs menjadi prioritas yang harus dicapai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat melalui kebijakan terkait anggaran serta komitmen untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Adapun peluang yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat antara lain;

1. Program pendidikan beasiswa kedokteran;
2. Program Ambulance Hebat di seluruh Kecamatan;
3. Program pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan tenaga kontrak daerah, pegawai tidak tetap daerah dan perawat pekon;
4. Puskesmas di Kabupaten Lampung Barat telah terakreditasi dan teregistrasi di Kementerian Kesehatan RI dengan status Puskesmas Rawat Inap;
5. Puskesmas telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Tahun 2023;
6. Puskesmas di Kabupaten Lampung Barat telah memenuhi standar sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai Permenkes 43 Tahun 2019;
7. Pelayanan Kesehatan pada wilayah terpencil dan perbatasan;
8. Dukungan fasilitas Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) di Kecamatan, Kabupaten, dan Provinsi;
9. Dukungan Anggaran DAK Fisik dan Non Fisik;
10. Jaminan JKN PBI Luar Kuota bersumber APBD;
11. Di Kabupaten Lampung Barat terdapat dua FKRTL Tipe C yaitu RS milik Pemerintah RSUD Alimuddin Umar dan RS swasta RSIA Bunda.

E. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Tahun 2023

1. Penguatan Pelayanan BLUD melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
2. Peningkatan Cakupan Layanan Kesehatan, Penambahan layanan PONED,

Rencana Pembangunan Rumah Sakit Pratama sebagai upaya mendekatkan akses layanan rujukan melalui Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;

3. Pemenuhan kebutuhan SDM Kesehatan dan Peningkatan mutu dan kompetensi SDM Kesehatan melalui Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
4. Pemenuhan obat esensial dan alat kesehatan sesuai standar melalui Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman;
5. Peningkatan kegiatan Promotif dan preventif melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review dilakukan terhadap Rancangan Awal RKPD berdasarkan hasil telaahan kebutuhan-kebutuhan pada saat proses penyusunan RKPD dilaksanakan. Telaahan kebutuhan dimaksud berupa indikator kinerja yang diharapkan, program dan kegiatan yang akan diusulkan serta kebutuhan pagu dana indikatif yang diperlukan.

Telaahan kebutuhan dilakukan berdasarkan adanya masukan dan saran dari hasil review RPD dan Rancangan Renstra Perangkat Daerah oleh Kementerian PAN RB, Review Rancangan Renstra dan Renja Perangkat Daerah oleh Bappeda, Hasil Musrenbang dan juga kebijakan-kebijakan dari Kementerian Kesehatan.

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Provinsi/Kabupaten/Kota Lampung Barat

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan

No	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Program Penunjang Urusan Pemerinthn Kab. /Kota	Lampung Barat	Jumlah Bidang/Urusan dilaksanakan	1	110.730.211.601	Program Penunjang Urusan Pemrintahn Kab /Kota	Lampung Barat	Nilai SAKIP OPD	81,7	110.730.211.601	
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Perencanan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun & disediakan	100%	202.000.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11	202.000.000	
								Jumlah dokumen Penganggaran Daerah yang disusun	5		
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12		
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	56.514.439.321	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	665	56.514.439.321	
								Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2		
								Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	19		
								Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2		
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Pelaksanaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	100%	23.792.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	27	23.792.000	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	131.185.500	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2	131.185.500	
								Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas-Fungsi Mengikuti Pendidikan & Pelatihan	12		
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pelaksanaaa Administrasi Umu Perangkat Daerah	100%	1.461.120.500	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	10	1.461.120.500	
								Jumlah Paket Peralatan & Perlengkapan Kantor Disediakan	4		
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1		
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1		
								Jumlah Paket Barang Cetakn & Penggandaan Disediakan	9		
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	9		
								Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	13		

No	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24		
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	100%	116.225.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	3	116.225.000	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Dokumen Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disusun dan disediakan	100%	874.961.080	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Dokumen Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disusun dan disediakan	40	874.961.080	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100%	4.446.374.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	121	4.446.374.000	
9	Peningkatan Pelayanan BLUD		Jumlah Peningkatan Pelayanan Unit Kerja BLUD	16 Unit	46.960.114.200	Peningkatan Pelayanan BLUD		Jumlah Peningkatan Pelayanan Unit Kerja BLUD	16 Unit	46.960.114.200	
II	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Lampung Barat	Persentase Pemenuhan UKP dan UKM	100%	173.676.299.129	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Lampung Barat	Persentase Capaian SPA Puskesmas	86	173.676.299.129	
								Persentase Puskesmas terakreditasi madya	100		
								Persentase FKTP dan FKTL melaksanakan SISRUITE	100		
								Persentase Masyarakat memiliki JKN	70		
								Persentase persalinan di fasyankes	95		
								Prevalensi Balita Wasting	7		
								Persentase capaian 5 pilar STBM	30		
								Persentase Capaian Pencegahan Penyakit Menular	78		
								Persentase Capaian Pencegahan Penyakit Tidak Menular	78		
								Persentase Capaian IDL	100		
								Persentase Puskesmas melaksanakan SIK	100		
								Akreditasi RSUD AU Utama	100		
								Persentase Capaian SPA RSUDAU	58		
								Persentase Sarana Fasilitas Pelayanan yang tersedia dan terpelihara	100		
								BOR RSUDAU	40		
								ALOS RSUD AU	4		

No	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
1	untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota		Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Tersedianya Obat dan BHP RSUD AU	100			Kegiatan Hasil Musrenba
								Persentase tersedia dan terpeliharanya sarana prasarana RSUD AU	100			
								Persentase Puskesmas mendapatkan penyediaan dan pemeliharaan SPA	100			
								Persentase ketersediaan rasio tempat tidur RS/1000 penduduk	100			
								Persentase tersedianya Obat, Vaksin dan BHP Puskesmas	100			
								Persentase Puskesmas dan Faskes Lainnya menerima distribusi obat, vaksin dan BHP	100			
								Persentase Puskesmas melaksanakan PIS-PK	100			
2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	39.719.489.975	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Nilai SPM KIA Gizi	75	39.719.489.975		
								Nilai SPM Penyakit Menular	80			
								Nilai SPM Penyakit Tidak Menular dan ODGJ	80			
								Jumlah Puskesmas Terakreditasi	15			
								Jumlah Peserta JKN	220.000			
								Persentase Puskesmas terintegrasi PSC 119	100			
								Jumlah Jenis media yang digunakan dalam promosi kesehatan	4			
								Persentase Puskesmas melaksanakan program 5 pilar stbm	100			
								Persentase Puskesmas melaksanakan surveilans kesehatan	100			
								Persentase Faskes lainnya mendapatkan operasional	100			
								Nilai SPM (RSUD AU)	80			
								Persentase pengelolaan pelayanan Rawat Jalan RSUD AU	100			
								Persentase pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat dan operasional pelayanan RS	100			
								Persentase pelaksanaan pengelolaan upaya kesehatan khusus (RSUD AU)	100			
3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	3 Dokumen	230.750.000	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	3 Dokumen	230.750.000		
4	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas		Persentase Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas	100%	437.975.000	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas		Persentase Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Kabupaten/Kota mendapatkan	100%	437.975.000		

No	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Kabupaten/Kota		Pelayanan Kesehatan Tingkat Kabupaten/Kota mendapatkan penerbitan izin			Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Kabupaten/Kota		penerbitan izin			
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Lampung Barat	Persentase Fasyankes yang memenuhi standar ketenagaan	60%	14.453.607.000	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Lampung Barat	Persentase Fasyankes memenuhi SDM sesuai Standart Persentase SDM RSUDAU yang memenuhi standart Persentase Nakes RSUDAU yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya	60 100 100	14.453.607.000	
1	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kab /Kota		Jumlah Dokumen Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kab /Kota	3 Dokumen	22.975.000	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	22.975.000	
2	Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan untuk UKP & UKM di Wilayah Kab /Kota		Persentase Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	70%	14.138.827.000	Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang terpenuhi Sesuai Standar Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 437 1	14.138.827.000	
3	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Tekhnis SDM Kesehatan Tingkat Daerah Kab /Kota		Persentase Pengembangan Mutu & Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan Tingkat Daerah Kab	100%	291.805.000	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Tekhnis SDM Kesehatan Tingkat Daerah Kab /Kota		Jumlah SDM Tingkat Kabupaten / Kota yang dikembangkan mutu dan ditingkatkan kompetensinya	190	291.805.000	
IV	Program Farmasi, Alat Kesehatan dan Sediaan Makanan dan Minuman	Lampung Barat	Persentase Pengndalian & Pengawasan Sarana Distribusi Serta Produk Sediaan Farmasi, Alkes & Makanan Minuman	75%	348.000.000	Program Farmasi, Alat Kesehatan dan Sediaan Makanan dan Minuman	Lampung Barat	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Sarana Distribusi Serta Produk Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Persentase Pemeriksaan Laik Hygine Sentra Produksi dan Distribusi Makanan	75 100	348.000.000	
1	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) mendapatkan	28 Sarana	48.000.000	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memenuhi standar dan mendapatkan izin	49%	48.000.000	

No	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			penerbitan izin								
2	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga & Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makmin tertentu yang dapat diproduksi oleh IRT		Persentase Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang diproduksi oleh IRT	100%	120.000.000	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh IRT		Persentase Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah yang diterbitkan sesuai ketentuan	40%	120.000.000	
2	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan & Depot Air Minum (DAM)		Persentase Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) : Jasa Boga, Rumah Makan dan Depot Air Minum (DAM)	100%	30.000.000	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		Persentase Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	100%	30.000.000	
3	Penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan		Persentase Penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	100%	20.000.000	Penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan		Persentase Penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	100%	20.000.000	
4	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada produksi dan produk makanan minuman IRT		Persentase Pemeriksaan & TL Hasil Pemeriksaan Post Market pada produksi & produk makanan minuman IRT	100%	130.000.000	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada produksi dan produk makanan minuman IRT		Persentase Pemeriksaan & TL Hasil Pemeriksaan Post Market pada produksi dan produk makanan minuman IRT	40%	130.000.000	
V	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Lampung Barat	Persentase Keluarga berPHBS	35%	2.866.345.000	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Lampung Barat	Persentase Keluarga berPHBS	35%	2.866.345.000	
1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemintraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kab./Kota		Persentase Pelaksanaan Advokasi, Pemberdayaan, Kemintraan, Peningkatan PSM dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	1.297.501.000	Advokasi, Pemberdayaan, Kemintraan, Peningkatan PSMt dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen hasil peningkatan upaya promosi Kesehatan, Advokasi, kemitraan dan Pemberdayaan, Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	1.297.501.000	
2	Pelaksanaan Sehat		Persentase Pelaksanaan	100%	1.553.117.000	Pelaksanaan Sehat		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi	1	1.553.117.000	

No	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	dalam rangka Promotif, Preventif Tingkat Daerah Kabupaten Kota		Sehat dalam rangka Promotif, Preventif Tingkat Daerah Kabupaten Kota			dalam rangka Promotif, Preventif Tingkat Daerah Kabupaten Kota		Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat			
								Jumlah Keluarga melaksanakan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesga & Lingkungan dengan menerapkan PHBS	300		
3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pngmbangan & Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah KabKota	100%	15.727.000	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervise pengembangan dan pelaksanaan UKBM	100%	15.727.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses perencanaan usulan kegiatan dilakukan berbagai tahapan-tahapan baik dilingkungan internal Perangkat Daerah maupun eksternal. Dalam lingkup internal dilakukan mekanisme usulan mulai dari tingkat Puskesmas, Rumah Sakit dan Bidang Program. Sementara itu pada lingkup eksternal penjangkaran usulan masyarakat dimulai dari Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Pekon/Desa, Musrenbang Kecamatan yang kemudian dilakukan pembahasan dengan Tim terkait di tingkat Kabupaten yang kemudian ditindaklanjuti dengan Musrenbang Kabupaten. Adapun untuk usulan yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dituangkan dalm Pokok Pikiran (Pokir) yang juga dilanjutkan dengan pembahasan bersama Tim Pembahas terkait.

Pembahasan dilakukan untuk menelaah apakah usulan-usulan tersebut sejalan dengan arah dan kebijakan pembangunan yang diterapkan, urgensi dan kemanfaatan kepada masyarakat, serta aspek-aspek perencanaan lain yang relevan. Pembahasan dilakukan juga agar tidak terjadi tumpang tindih atau duplikasi atas usulan dan pendanaan baik internal OPD maupun lintas OPD.

Berikut adalah penelaahan atas usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel 2.5.1
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Provinsi/Kabupaten/Kota Lampung Barat
Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
	Program Pemenuhan UKP & UKM				
A	Kegiatan Penyediaan Fasyankes				
1	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Sumber Jaya	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	3 Unit	Prioritas Kecamatan
2	Keg Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas (Bronjong)	Kebun Tebu	Rehabilitasi Puskesmas	1 Unit	Prioritas Kecamatan
	Paving dan Pagar Puskesmas	Balik Bukit	antisipasi terjadinya longsor	200 m	Prioritas 2 Tk Kec
		BNS			
		Kenali		1000 m	
	Rehab Puskesmas	Sumber Jaya	Jumlah Alkes, Sarpras yang dilakukan pemeliharaan dan Rehabilitasi Oleh Puskesmas	212 m	
		Sekincau		1 Unit	Rehab Berat/Pembangunan Baru (DAK)
	Bronjong Lahan Puskesmas	Sekincau			
3	Keg Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Alkes, Sarpras yang dilakukan pemeliharaan dan Rehabilitasi Oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya		
	Paving dan Pagar Pustu	Batu Brak			Pustu Kembahang (Prioritas 2 Kec)
		BNS			Pustu Cipta Waras
	Pagar Pustu	Gedung Surian		1 x 50 M2	Pustu Pura Mekar
		Sumber Jaya		97 m	Pustu Sukajaya
	Rehabilitasi Pustu	Batu Brak		1 Unit	Pustu Teba Liokh (Prioritas 1 Kec)
		Batu Ketulis		1 Unit	Pustu Luas
		Sekincau		1 Unit	Pustu Waspada

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
		Way Tenong		1 Unit	Pustu Tanjung Raya
4	Keg Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan		Jumlah Sarpras Rumah Dinas		
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Balik Bukit	Tenaga Kesehatan di	3 Unit	Prioritas 3 Tk Kec/DAK
		BNS	Lakukan	1 Unit	
		Kebun Tebu	Rehabilitasi dan	2 Unit	
		Sukau	Pemeliharaan	1 Unit	
		Sumber Jaya		1 Unit	
5	Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan dan Penunjang Medik Lainnya		Jumlah Alkes/Penunjang Medik Lainnya		
	Pengadaan Alat Kesehatan	Gedung Surian	disediakan		Pustu Cipta Waras
6	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Lainnya		Jumlah Prasarana		
	Sarana Air Bersih	Gedung Surian	Fasyankes		Pustu Tri Mulyo
		Way Tenong	disediakan		Pustu Mutar Alam
	Pusling Roda 2	Kebun Tebu		1 Unit	
		Sukau		1 Unit	
B	Kegiatan Penyediaan Yankes UKM UKP Rujukan Tk Daerah Kab/Kota				
1	Kegiatan Pengelolaan Gizi Masyarakat (PMT)	Sekincau	Jumlah Dokumen		
		Sumber Jaya	Pengelolaan Gizi Masyarakat		

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telahan terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan Renja PD sebagai dokumen wajib yang harus disusun mengacu pada Permendagri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Arah kebijakan pembangunan kesehatan nasional adalah meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penguatan pelayanan kesehatan dasar (*primary health care*) dan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi. Arah kebijakan nasional tersebut dicapai melalui lima strategi, yaitu peningkatan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi; percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda; peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit; pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS); dan penguatan sistem kesehatan. Adapun Strategi Nasional Pembangunan Kesehatan dapat diuraikan sebagai berikut;

A. Meningkatkan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi Mencakup:

1. Peningkatan pelayanan maternal dan neonatal berkesinambungan di fasilitas pelayanan kesehatan publik dan swasta dengan mendorong seluruh persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu menangani pelayanan emergensi komprehensif didukung jaminan pembiayaan, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan termasuk penguatan kemampuan deteksi dini faktor risiko dalam kehamilan; peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan antenatal, neonatal, persalinan, dan pasca persalinan; perbaikan sistem rujukan maternal yang didukung dengan peningkatan kapasitas sistem kesehatan dan penguatan regulasi; penyediaan sarana prasarana dan farmasi serta jaminan ketersediaan darah setiap saat, dan pencatatan kematian ibu di fasilitas pelayanan kesehatan terutama untuk penguatan tata laksana; Perluasan dan pengembangan imunisasi dasar lengkap, termasuk vaksin untuk pneumonia;
2. Peningkatan gizi remaja putri dan ibu hamil;
3. Peningkatan pengetahuan, pemahaman dan akses layanan kesehatan reproduksi remaja secara lintas sektor yang responsif gender.

B. Percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda Mencakup:

1. Penguatan komitmen, kampanye, pemantauan dan evaluasi upaya perbaikan gizi masyarakat;
2. Pengembangan sistem jaminan gizi dan tumbuh kembang anak dengan pemberian jaminan asupan gizi sejak dalam kandungan, perbaikan pola asuh keluarga, dan perbaikan fasilitas air bersih dan sanitasi lingkungan;
3. Percepatan penurunan stunting dengan peningkatan efektivitas intervensi spesifik, perluasan dan penajaman intervensi sensitif secara terintegrasi;
4. Peningkatan intervensi yang bersifat life saving dengan didukung bukti (evidence based policy) termasuk fortifikasi pangan;
5. Penguatan advokasi dan komunikasi perubahan perilaku terutama mendorong pemenuhan gizi seimbang berbasis konsumsi pangan (food based approach);
6. Penguatan sistem surveilans gizi;
7. Peningkatan komitmen dan pendampingan bagi daerah dalam intervensi perbaikan gizi dengan strategi sesuai kondisi setempat;
8. Respon cepat perbaikan gizi dalam kondisi darurat.

C. Peningkatan pengendalian penyakit, peningkatan pengendalian penyakit dengan perhatian khusus pada jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker, tuberkulosis, malaria, HIV/AIDS, emerging diseases, penyakit yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa, penyakit tropis terabaikan (kusta, filariasis, schistosomiasis), gangguan jiwa, cedera, gangguan penglihatan, dan penyakit gigi dan mulut. Mencakup:

1. Pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit termasuk perluasan cakupan deteksi dini, penguatan surveilans real time, pengendalian vektor, dan perluasan layanan berhenti merokok;
2. Penguatan health security terutama peningkatan kapasitas untuk pencegahan, deteksi, dan respons cepat terhadap ancaman penyakit termasuk penguatan alert system kejadian luar biasa dan karantina kesehatan;
3. Peningkatan cakupan penemuan kasus dan pengobatan serta penguatan tata laksana penanganan penyakit dan cedera;
4. Pengendalian resistensi antimikroba;
5. Pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian penyakit dan penguatan sanitasi total berbasis masyarakat

D. Pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) mencakup:

1. Pengembangan kawasan sehat antara lain kabupaten/kota sehat, pasar sehat, Upaya

Kesehatan Sekolah (UKS) dan lingkungan kerja sehat;

2. Penyediaan lingkungan yang mendorong aktivitas fisik seperti penyediaan ruang terbuka publik, transportasi masal dan konektivitas antar moda, lingkungan sehat, dan penurunan polusi udara;
3. Regulasi yang mendorong pemerintah pusat dan daerah serta swasta untuk menerapkan pembangunan berwawasan kesehatan dan mendorong hidup sehat termasuk pengembangan standar dan pedoman untuk sektor non kesehatan, peningkatan cukai hasil tembakau secara bertahap dengan mitigasi dampak bagi petani tembakau dan pekerja industri hasil tembakau, pelarangan total iklan dan promosi rokok, perbesaran pencantuman peringatan bergambar bahaya merokok, perluasan pengenaan cukai pada produk pangan yang berisiko tinggi terhadap kesehatan dan pengaturan produk makanan dengan kandungan gula, garam dan lemak;
4. Promosi perubahan perilaku hidup sehat yang inovatif dan pembudayaan olahraga, pemberdayaan masyarakat dan penggerakan masyarakat madani untuk hidup sehat;
5. Peningkatan penyediaan pilihan pangan sehat termasuk penerapan label pangan, perluasan akses terhadap buah dan sayur, dan perluasan gerakan memasyarakatkan makan ikan;

E. Penguatan Sistem Kesehatan

1. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, difokuskan pada:
 - a) Penguatan fungsi puskesmas dan jaringannya dalam upaya kesehatan masyarakat yang berkualitas dan didukung peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan;
 - b) Optimalisasi penguatan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga;
 - c) Revitalisasi posyandu dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat lainnya;
 - d) Pengembangan kebijakan khusus untuk pelayanan kesehatan di daerah terpencil, sangat terpencil dan daerah dengan karakteristik geografis tertentu (kepulauan) termasuk sistem rujukan, pola pembiayaan, regulasi dan kelembagaan;
 - e) Pengembangan pelayanan kesehatan lanjut usia;
 - f) Penyempurnaan sistem akreditasi pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta;
 - g) Pemenuhan dan pemerataan penyediaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang mengacu rencana induk penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan;
 - h) Inovasi dan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kesehatan meliputi perluasan sistem rujukan online termasuk integrasi fasilitas kesehatan swasta dalam sistem rujukan, perluasan cakupan dan pengembangan jenis layanan telemedicine, digitalisasi rekam medis dan rekam medis online;

- i) Perluasan pelayanan kesehatan bergerak (flying dan sailing health care) dan gugus pulau;
 - j) Pengembangan dan peningkatan kualitas RS;
 - k) Penyediaan pengelolaan limbah medis fasilitas pelayanan kesehatan dan pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3).
2. Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan difokuskan pada;
- a) Afirmasi pemenuhan tenaga kesehatan strategis
 - b) Afirmasi pendidikan (beasiswa dan tugas belajar) tenaga kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) dan daerah kurang diminati;
 - c) Afirmasi pendayagunaan dan mekanisme redistribusi tenaga kesehatan yang ditempatkan di fasilitas pelayanan kesehatan.
 - d) Pengembangan mekanisme kerjasama pemenuhan tenaga kesehatan melalui penugasan sementara dan kontrak pelayanan;
 - e) Perluasan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan fokus pada pelayanan kesehatan dasar;
 - f) Pengembangan tenaga kesehatan untuk penguatan fungsi pelayanan kesehatan dasar seperti promosi kesehatan dan perawat komunitas;
 - g) Penyesuaian program studi dan lembaga pendidikan bidang kesehatan dengan kebutuhan dan standar;
 - h) Pemenuhan tenaga kesehatan sesuai standar dan tenaga non-kesehatan termasuk tenaga sistem informasi dan administrasi keuangan untuk mendukung tata kelola di fasilitas pelayanan kesehatan.
3. Pemenuhan dan peningkatan daya saing farmasi dan alat Kesehatan, difokuskan pada;
- a) Efisiensi penyediaan obat dan vaksin dengan mengutamakan kualitas produk;
 - b) Penguatan sistem logistik farmasi real time berbasis elektronik;
 - c) Peningkatan promosi dan pengawasan penggunaan obat rasional;
 - d) Pengembangan obat, produk biologi, reagen, dan vaksin dalam negeri bersertifikat halal yang didukung oleh penelitian dan pengembangan life sciences;
 - e) Pengembangan produksi dan sertifikasi alat kesehatan untuk mendorong kemandirian produksi dalam negeri.
4. Penguatan tata kelola, pembiayaan kesehatan dan penelitian kesehatan, difokuskan pada;
- a) Pengembangan kebijakan untuk penguatan kapasitas pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;
 - b) Pendampingan perbaikan tata kelola pada daerah yang memiliki masalah kesehatan untuk pencapaian target nasional dan mendorong pemenuhan Standar Pelayanan

Minimal (SPM) Bidang Kesehatan;

- c) Integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sistem informasi kesehatan pusat dan daerah termasuk penerapan sistem single entry;
- d) Penguatan data rutin;
- e) Inovasi dan pemanfaatan teknologi digital untuk pengumpulan data, termasuk big data, media promosi, komunikasi, dan edukasi kesehatan;
- f) Peningkatan pemanfaatan anggaran untuk penguatan promotif dan preventif berbasis bukti;
- g) Pengembangan sumber pembiayaan baru seperti penerapan earmark cukai dan pajak, pembiayaan bersumber masyarakat, dan kerjasama pemerintah dan swasta;
- h) Peningkatan kapasitas dan kemandirian pembiayaan fasilitas kesehatan milik pemerintah
- i) Penguatan penelitian dan pengembangan untuk efektivitas inovasi intervensi, dan evaluasi sistem kesehatan untuk mendukung pencapaian prioritas nasional.

5. Penguatan Pelaksanan JKN

Difokuskan pada peningkatan efektivitas JKN didukung pemerataan penyediaan pelayanan kesehatan (supply side) dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, perumusan paket manfaat JKN secara eksplisit, penerapan active purchasing termasuk perbaikan sistem pembayaran fasilitas pelayanan kesehatan dan pengembangan mekanisme cost- sharing, penguatan Health Technology Assessment (HTA), dewan pertimbangan klinis, dan tim kendali mutu dan kendali biaya, pengembangan dan penerapan pedoman nasional pelayanan kesehatan, peningkatan penyedia pelayanan kesehatan sesuai standar di seluruh wilayah terutama melalui kerjasama dengan swasta, integrasi data JKN dengan sistem informasi kesehatan dan pemanfaatan data pelayanan BPJS kesehatan untuk penyusunan kebijakan bagi para pemangku kepentingan.

Untuk mendukung kebijakan nasional pembangunan kesehatan tersebut, maka ditetapkan arah kebijakan Kementerian Kesehatan sebagai berikut:

1. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP pemerintah dan FKTP swasta.
2. Pelayanan kesehatan menggunakan pendekatan siklus hidup, mulai dari ibu hamil, bayi, anak balita, anak usia sekolah, remaja, usia produktif, dan lansia, dan intervensi secara kontinum (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif) dengan penekanan pada promotif dan preventif.
3. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.

4. Penguatan sistem kesehatan di semua level pemerintahan menjadi responsif dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dengan didukung inovasi teknologi.
5. Peningkatan sinergisme lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas, termasuk integrasi lintas program.

Kelima arah kebijakan Kementerian Kesehatan tersebut digunakan sebagai pemandu dalam menyusun Tujuan Strategis dan Sasaran Strategis Renstra Kementerian Kesehatan 2023-2026. Kementerian Kesehatan telah menetapkan 5 (lima) Tujuan Strategis, yang dijabarkan menjadi 8 (delapan) Sasaran Strategis, dalam menjalankan pembangunan kesehatan 2020-2024. Delapan Sasaran Strategis tersebut adalah :

1. Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat Meningkatkan kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat dilaksanakan melalui strategi:
 - a) Peningkatan pelayanan ibu dan bayi berkesinambungan di fasilitas publik dan swasta melalui sistem rujukan terpadu dan berkesinambungan semenjak ANC;
 - b) Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan antenatal dan postnatal bagi ibu dan bayi baru lahir, termasuk imunisasi;
 - c) Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan persalinan di fasilitas kesehatan;
 - d) peningkatan kompetensi tenaga kesehatan terutama bidan dalam mendeteksi dini faktor risiko kematian;
 - e) Peningkatan penyediaan darah setiap saat dibutuhkan;
 - f) Perbaikan pencatatan kematian ibu dan kematian bayi di fasyankes dan masyarakat melalui pengembangan PS2H (Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati);
 - g) Penguatan dan pengembangan pelaksanaan MTBS;
 - h) Perluasan cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) mencapai UCI (Universal Child Immunization) sampai level desa;
 - i) Peningkatan cakupan ASI eksklusif;
 - j) Peningkatan gizi remaja putri dan ibu hamil;
 - k) Peningkatan efektivitas intervensi spesifik, perluasan dan penajaman intervensi sensitif secara terintegrasi sampai tingkat desa;
 - l) Peningkatan cakupan dan mutu intervensi spesifik mulai dari remaja, ibu hamil, bayi, dan anak balita;
 - m) Penguatan kampanye nasional dan strategi komunikasi untuk perubahan perilaku sampai pada keluarga;

- n) Penguatan puskesmas dalam penanganan balita gizi buruk dan wasting;
 - o) Penguatan sistem surveilans gizi;
 - p) Pendampingan ibu hamil untuk menjamin asupan gizi yang berkualitas;
 - q) Pendampingan baduta untuk mendapatkan ASI eksklusif, makanan pendamping ASI, dan stimulasi perkembangan yang adekuat;
 - r) Promosi pembudayaan hidup sehat, melalui edukasi literasi kesehatan;
 - s) Revitalisasi posyandu, posbindu, UKS, dan UKBM lainnya untuk edukasi kesehatan, skrining, dan deteksi dini kasus;
 - t) Meningkatkan metode/cara promosi kesehatan, melalui TV spot, leaflets, booklet, media sosial, dan sebagainya;
 - u) Pengembangan kawasan sehat antara lain kabupaten/kota sehat, pasar sehat, UKS dan lingkungan kerja sehat;
 - v) Melakukan aksi multisektoral untuk mendorong penyediaan ruang terbuka publik, aktivitas fisik (olah raga), stop smoking, penurunan polusi udara, dan peningkatan lingkungan sehat;
 - w) Mendorong regulasi pemerintah pusat dan daerah serta swasta untuk menerapkan pembangunan berwawasan kesehatan /Health in All Policy (HiAP).
2. Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan Dilaksanakan melalui strategi:
- a) Peningkatan ketersediaan fasyankes dasar dan rujukan (FKTP dan FKRTL) yang difokuskan pada daerah yang akses secara fisik masih terkendala (DTPK), di mana untuk wilayah perkotaan lebih didorong peran swasta;
 - b) Pengembangan dan pelaksanaan rencana induk nasional penyediaan fasyankes
 - c) Penyempurnaan standar pelayanan kesehatan;
 - d) Pemanfaatan inovasi teknologi dalam pelayanan kesehatan termasuk laboratorium kesehatan meliputi perluasan sistem rujukan online termasuk integrasi fasilitas kesehatan swasta dalam sistem rujukan, sistem rujukan khusus untuk daerah dengan karakteristik geografis tertentu (kepulauan dan pegunungan);
 - e) Perluasan cakupan dan pengembangan jenis layanan telemedicine, digitalisasi rekam medis dan rekam medis online; perluasan pelayanan kesehatan bergerak (flying health care) dan gugus pulau;

- f) Penguatan Health Technology Assessment (HTA), dewan pertimbangan klinis, dan tim kendali mutu dan kendali biaya, pengembangan dan penerapan clinical pathway;
 - g) Penguatan kemampuan RS Khusus;
 - h) Penguatan pelayanan kesehatan primer sebagai sebuah sistem, melalui peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, penguatan sistem koordinasi jejaring dan jaringan puskesmas, penguatan promotif, preventif dan penemuan dini kasus melalui penguatan UKBM, praktek mandiri, klinik pratama, penguatan aksi multisektoral melalui pelibatan seluruh stakeholder, dan penguatan konsep wilayah kerja;
 - i) Penguatan kepemimpinan dan manajemen di dinas kesehatan dan puskesmas dalam rangka penguatan pelayanan kesehatan primer sebagai sebuah sistem;
 - j) Perbaikan pengelolaan limbah medis fasyankes & pengendalian B3
3. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat dilakukan melalui strategi:
- a) Perluasan cakupan deteksi dini PM dan PTM, termasuk pencapaian cakupan SPM Bidang Kesehatan;
 - b) Peningkatan inovasi pengendalian vektor, termasuk pengendalian vektor terpadu, dan pengendalian vektor secara biologis;
 - c) Penguatan tata laksana penanganan penyakit dan cedera;
 - d) Penguatan sanitasi total berbasis masyarakat;
 - e) Peningkatan akses air bersih dan perilaku higienis;
 - f) Penguatan legislasi, kebijakan dan pembiayaan untuk kegawatdaruratan kesehatan masyarakat;
 - g) Peningkatan advokasi dan komunikasi;
 - h) Peningkatan program pencegahan resistensi antibiotika, penyakit zoonosis, keamanan pangan, manajemen biorisiko;
 - i) Penguatan sistem laboratorium nasional, termasuk laboratorium kesehatan masyarakat untuk penguatan surveilans;
 - j) Penguatan reporting dan real time surveillance untuk penyakit berpotensi wabah dan penyakit baru muncul (new emerging diseases);
 - k) Membangun sistem kewaspadaan dini;
 - l) Membangun kemampuan fasyankes untuk respon cepat;
 - m) Peningkatan kemampuan daerah termasuk SDM.

4. Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan
Meningkatkan akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan dilakukan melalui strategi:
 - a) Memastikan ketersediaan obat esensial dan vaksin di fasilitas pelayanan kesehatan, terutama di puskesmas, dengan melakukan pembinaan pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar di instalasi farmasi provinsi, kabupaten/kota dan puskesmas;
 - b) Menerapkan sistem data dan informasi pengelolaan logistik obat secara terintegrasi antara sarana produksi, distribusi, dan pelayanan kesehatan;
 - c) Penguatan regulasi sistem pengawasan pre dan post market alat kesehatan, melalui penilaian produk sebelum beredar, sampling dan pengujian, inspeksi sarana produksi dan distribusi termasuk pengawasan barang impor Border dan Post Border, dan penegakan hukum;
 - d) Meningkatkan daya saing dan kemandirian industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri, melalui penciptaan iklim ramah investasi, optimalisasi hubungan kerjasama luar negeri, membangun sinergi Academic-Business-Government-Community-Innovator (A-B-G-C-I), hilirisasi, serta fasilitasi pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan ke arah biopharmaceutical, vaksin, natural, Active Pharmaceutical Ingredients (API) kimia dan industri alat kesehatan teknologi tinggi;
 - e) Mendorong tersedianya vaksin halal melalui penyusunan roadmap vaksin halal;
 - f) Mendorong produksi alat kesehatan dalam negeri dengan mengutamakan pemanfaatan komponen lokal serta penggunaan alat kesehatan dalam negeri melalui promosi, advokasi, dan pengawasan implementasi regulasi;
 - g) Menjalankan program promotif preventif melalui pemberdayaan masyarakat, terutama untuk meningkatkan penggunaan obat rasional dan alat kesehatan tepat guna di masyarakat serta pemanfaatan kearifan lokal melalui Gerakan Bugar dengan Jamu dan pemanfaatan Obat Modern Asli Indonesia (OMAI).
5. Meningkatnya pemenuhan SDM kesehatan dan kompetensi sesuai standar
Meningkatkan pemenuhan SDM kesehatan dan kompetensi sesuai standar dilakukan melalui strategi:
 - a) Pemenuhan tenaga kesehatan di puskesmas sesuai standar;
 - b) Pemenuhan tenaga dokter spesialis di rumah sakit sesuai standar;
 - c) Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan terkait program prioritas nasional (penurunan kematian maternal, kematian bayi, stunting, pengendalian penyakit);

- d) Afirmasi pendidikan tenaga kesehatan strategis untuk wilayah DTPK;
 - e) Pembuatan skema penempatan tenaga kesehatan untuk pemenuhan standar jumlah nakes dengan pendekatan insentif yang memadai dan perbaikan regulasi;
 - f) Meningkatkan kapasitas tenaga kader kesehatan di UKBM (posyandu, posbindu) dan memberikan reward yang memadai sesuai kinerja yang ditetapkan.
6. Terjaminnya pembiayaan kesehatan Meningkatkan pembiayaan kesehatan dilakukan melalui strategi:
- a) Mendorong peningkatan pembiayaan kesehatan dari komponen APBN, khususnya terkait Upaya Kesehatan Masyarakat;
 - b) Pemenuhan pembiayaan kesehatan untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN;
 - c) Mendorong peningkatan pembiayaan kesehatan dari APBD minimal 10% dari APBD;
 - d) Mendorong peningkatan pembiayaan kesehatan oleh swasta.
7. Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih Meningkatkan sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dilakukan melalui strategi:
- a) Pengembangan kebijakan untuk penguatan kapasitas pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;
 - b) Pendampingan perbaikan tata kelola pada daerah yang memiliki masalah kesehatan untuk pencapaian target nasional dan mendorong pemenuhan SPM Bidang Kesehatan;
 - c) Integrasi, interoperabilitas, sinkronisasi dan simplifikasi sistem informasi kesehatan pusat dan daerah termasuk penerapan sistem single entry;
 - d) Penguatan manajemen kesehatan di kabupaten/kota dalam kerangka otonomi pembangunan kesehatan;
 - e) Mendorong sinergisme perencanaan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
 - f) Mendorong penerapan revolusi mental dan reformasi birokrasi;
 - g) Mendorong efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran pemerintah;
 - h) Meningkatkan pendekatan manajemen berbasis kinerja;
 - i) Meningkatkan jumlah unit yang masuk dalam kategori WBK dan WBBM.

8. Meningkatnya efektivitas pengelolaan penelitian dan pengembangan kesehatan dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan. Meningkatkan efektivitas pengelolaan penelitian dan pengembangan kesehatan untuk pengambilan keputusan dilakukan melalui strategi:
- a) Melaksanakan penelitian, pengembangan, dan pengkajian untuk mendukung pencapaian pembangunan kesehatan sesuai dengan RPJMN Bidang Kesehatan dan Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024;
 - b) Memperkuat jejaring penelitian kesehatan dan jejaring laboratorium guna memperkuat sistem penelitian kesehatan nasional ;
 - c) Meningkatkan riset untuk penguatan data rutin baik di fasilitas kesehatan dan masyarakat;
 - d) Meningkatkan diseminasi dan advokasi hasil penelitian untuk mendorong pemanfaatan hasil penelitian untuk perbaikan kebijakan dan program kesehatan;
 - e) Mengembangkan dashboard sistem informasi pembangunan kesehatan yang real time;
 - f) Meningkatkan integrasi, interoperabilitas dan pemanfaatan data hasil penelitian dan data rutin;
 - g) Mengembangkan poros kebijakan guna peningkatan pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan pengkajian untuk perumusan dan perbaikan kebijakan kesehatan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat

A. Tujuan

Tujuan pembangunan kesehatan Kabupaten Lampung Barat, sesuai dengan misi yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Satuan Perangkat Kerja Perangkat Daerah (Renstra-PD) Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 - 2026 yaitu **“Mewujudkan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat”** dengan indikator Usia Harapan Hidup dengan terget 67,84 tahun.

B. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat adalah **“Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat”** melalui indikator sasaran sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat adalah :

Tabel 3.2.1
Indikator Sasaran Strategis
Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2023

No	Indikator	Target
1	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	110/100.000 KH
2	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	3,9/1.000 KH
3	Presentase Balita Stunting	10,94%
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	86%

3.3 Program Dan Kegiatan

A. Faktor - Faktor Yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program Dan Kegiatan

1. Capaian SDGs Sektor Kesehatan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau yang lebih dikenal sebagai Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan tujuan pembangunan global yang baru menggantikan Millenium Development Goals (MDGs) yang telah berakhir pada tahun 2015. Sustainable Development Goals (SDGs) disepakati oleh 190 negara dan disahkan melalui sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 25 Septermber 2015 di New York, Amerika Serikat. Agenda pembangunan global yang baru ini berlaku mulai dari tahun 2015 hingga 2030. Dalam mendukung capaian SDGs Kabupaten Lampung Barat tahun 2023 memiliki capaian sebagai berikut;

Tabel 3.3.1
Capaian SDGs Sektor Kesehatan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2020)	Tahun 2021		Target 2022
					Target	Capaian	
Target 2.1. Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi dan cukup sepanjang tahun							
2.1.1(a)	Prevalensi Balita Kurang Gizi (Underweight)	Dinas Kesehatan	Persen	6,83%	7,80%	10,94 %	7,5
Target 2.2. Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia lima tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta Manula							
2.2.1*	Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak balita	Dinas Kesehatan	Persen	10,97	24	10,94	22

2.2.1(a)	Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta	Dinas Kesehatan	Persen	5,68	7,53	5,12	
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi/ <i>wasting</i> (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	Dinas Kesehatan	Persen (<i>Wasting</i>)	5,43	7,8	7,5	7,5
			Persen (<i>Obesitas</i>)	-	-	-	-
2.2.2(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil	Dinas Kesehatan	Persen	14,32	42	14,95	39
2.2.2(b)	Persentase remaja yang mengonsumsi <i>Fe</i> (zat besi)	Dinas Kesehatan	Persen	82,95	52	92,2	54
2.2.2(c)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	Dinas Kesehatan	Persen	76,75	45	84,66	50
Target 3.1. Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup							
3.1.1(a)	Kasus Kematian Ibu	Dinas Kesehatan	Kasus	4	6	8	6
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Dinas Kesehatan	Persen	95,22	95	94,29	96
3.1.2(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Dinas Kesehatan	Persen	93,43	93	94,03	94
Target 3.2. Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000							
3.2.1(a)	Kasus Kematian Balita	Dinas Kesehatan	Kasus	16	23	25	21
3.2.2(a)	Kasus Kematian Neonatal	Dinas Kesehatan	Kasus	21	23	20	21
3.2.2(b)	Kasus Kematian Bayi	Dinas Kesehatan	Kasus	3	23	25	21
3.2.2(c)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 Persen imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Dinas Kesehatan	Persen	93,5	95	95,3	95
Target 3.3. Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya							
3.3.2(a)	Angka penemuan kasus TB (semua tipe yang dilaporkan/ <i>case notification rate</i>) per 100.000 penduduk	Dinas Kesehatan	Persen	69,090	172,00	74,8	172
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Dinas Kesehatan	API per 1000 penduduk	<1	<1	0	<1

3.3.3(a)	Angka kesakitan positif malaria (API) per 1.000 penduduk	Dinas Kesehatan	API per 1000 penduduk	0	0	0	<1
3.3.5(c)	Angka kesakitan (<i>incidence rate</i>) DBD per 100.000 penduduk	Dinas Kesehatan	Incidence Rate	31,434	<49	2,6	<49
Target 3.4. Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan							
3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Dinas Kesehatan	Kabupaten /Kota	-	-	-	-
Target 3.8. Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang							
3.8.1(a)	<i>Unmet need</i> pelayanan kesehatan.	Dinas Kesehatan	Persen				
3.8.2(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan	Persen		100	78,55	100
3.8.2(b)	Rasio Puskesmas	Dinas Kesehatan	Persen	1,4707	1,4649	1,00	1,00
3.8.2(c)	Jumlah Apotek PRB (Program Rujuk Balik)	Dinas Kesehatan	Apotek	0	1	2	2
Target 3.b. Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai <i>the Doha Declaration</i> tentang <i>the TRIPS Agreement and Public Health</i>, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi Semua							
3.b.1(a)	Persentase ketersediaan obat	Dinas Kesehatan	Persen	100	100	90,86	100

C. Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2023

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintahan Daerah selama 1 tahun anggaran dan membandingkan dengan target yang ditetapkan sebelumnya. SPM pelayanan dasar kesehatan tahun 2023 yang terdiri dari 12 indikator telah dilaksanakan yang hasilnya dapat dilihat pada table 2.3

Tabel Tabel 3.3.2
Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Kesehatan Tahun 2023

No	Standar Pelayanan Minimal			Realisasi	KET
	Indikator	Nilai Nasional	Nilai Daerah		
1	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	100	100	83,27	Profil 2022
2	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100	100	81,38	Profil 2022
3	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	85,97	Profil 2022
4	Setiap balita mendapatkan yankes sesuai standar	100	100	83,74	Profil 2022
5	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	100	86,03	Profil 2022
6	Setiap masyarakat Lampung Barat usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	100	84,22	Profil 2022
7	Setiap masyarakat Lampung Barat usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining	100	100	88,72	Profil 2022

	kesehatan sesuai standar				
8	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	72,75	Profil 2022
9	Setiap penderita DM mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	Profil 2022
10	Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	95,42	Profil 2022
11	Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100	100	68,47	Profil 2022
12	Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	100	100	100	Profil 2022

Jika dilihat dari tabel capaian SPM diatas terlihat bahwa 12 indikator yang dilaksanakan dalam pelayanan kesehatan belum mencapai target yang telah di tetapkan.

Pencapaian keberhasilan pembangunan kesehatan membutuhkan kerja keras yang melibatkan segenap lapisan masyarakat, bukan hanya tergantung pada sumber daya kesehatan yang ada, namun juga harus melibatkan partisipasi dan peran aktif lintas sektor terkait, masyarakat pada umumnya serta sektor swasta. Dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah bidang kesehatan secara nasional, tujuh sasaran yang menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan kesehatan berdasarkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan.

Berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2023 sebagai upaya pencapaian keberhasilan pembangunan kesehatan, baik itu melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan pada tingkat kabupaten maupun pada tingkat kecamatan melalui pelayanan kesehatan masyarakat di puskesmas yang ada di seluruh Kabupaten Lampung Barat. Untuk menunjang pelaksanaan program kesehatan di tingkat puskesmas dibutuhkan tenaga kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas. Salah satu hal yang masih menjadi kendala hingga saat ini adalah jumlah tenaga kesehatan yang masih kurang serta distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata sehingga terjadi ketimpangan ketersediaan tenaga kesehatan antara puskesmas yang satu dengan puskesmas yang lain.

Adapun Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten

a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-PD
3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-PD
4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA PD
5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA PD
6. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD
7. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan & Pengujian/Verifikasi Keuangan PD
3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi PD
4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun PD
5. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
6. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran PD
7. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran

c) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah PD
2. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah PD
3. Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada PD
4. Sub Kegiatan Rekonsiliasi & Penyusunan Laporan BMD pada PD
5. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik daerah pada PD
6. Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah PD

d) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
2. Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
4. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
5. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
6. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

e) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
6. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
8. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD
9. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada PD

f) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

g) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

h) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
4. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
5. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
7. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
8. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah

i) Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD

1. Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

a) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

1. Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
2. Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
3. Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
4. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
5. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
6. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
7. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
8. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
9. Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
10. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
11. Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin
12. Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai
13. Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
14. Sub Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
15. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
16. Sub Kegiatan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya

b) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Ibu Bersalin
3. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
4. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
5. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia Sekolah Dasar
6. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
7. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia lanjut

8. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
9. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
10. Sub Kegiatan Pengelolaan Yankes Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
11. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
12. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Risiko Terinfeksi HIV
13. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
14. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Gizi Masyarakat
15. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
16. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
17. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
18. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
19. Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan
20. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
21. Sub Kegiatan Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan
22. Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
23. Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
24. Sub Kegiatan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah
25. Sub Kegiatan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium
26. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
27. Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas
28. Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
29. Sub Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
30. Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
31. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
32. Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
33. Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)

34. Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria
35. Sub Kegiatan Pengelolaan Kawasan tanpa rokok
36. Sub kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota
37. Sub Kegiatan Pengelolaan dan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
- c) *Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi***
 1. Sub Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
 2. Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
- d) *Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Kabupaten/Kota***
 1. Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit kelas C, D dan Fasilitas kesehatan lainnya
 2. Sub Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
 3. Sub Kegiatan Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Yankes Rujukan
- 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**
 - a) *Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota***
 1. Pengendalian perizinan praktik tenaga Kesehatan
 2. Pembinaan dan Pengawasan Tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan
 - b) *Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota***
 1. Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
 2. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia kesehatan sesuai standar
 3. Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia kesehatan
 - c) *Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Tekhnis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***
 1. Pengembangan Mutu dan peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 4. Program Farmasi, Alat Kesehatan dan Sediaan Makanan dan Minuman**
 - a) *Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)***
 1. Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
 2. Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha

b) *Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga*

1. Sub Kegiatan Pengendalian & Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga & Nomor PIRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Diproduksi oleh IRT

c) *Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)*

1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

d) *Penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan*

1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan

e) *Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga*

1. Sub Kegiatan Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
2. Subkegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

a) *Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*

1. Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat

b) *Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif, Preventif Tingkat Daerah Kabupaten Kota*

1. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
2. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

c) *Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*

1. Bimbingan Tekhnis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM).

Tabel TC-33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Lampung Barat
Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	4	5		6	7	8	9		10
	TUJUAN									
	Mewujudkan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		67,84	Tahun				68	Tahun	
	SASARAN									
	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat		110	/100.000 KH				105	/100.000 KH	
			3,9	/1.000 KH				3,8	/1.000 KH	
			10,94	%				10,8	%	
			86	%				87	%	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/ KOTA	Lampung Barat	82	poin	214.244.309.273			81,8	poin	112.178.767.792
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lampung Barat	10	dokumen	91.150.000	DAU		10	dokumen	327.474.000
		Lampung Barat	5	dokumen				5	dokumen	
		Lampung Barat	12	dokumen				12	dokumen	
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Lampung Barat	11	dokumen	18.420.000			8	dokumen	55.000.000

1.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-PD	Lampung Barat	1	dokumen	12.855.000			1	dokumen	20.000.000
1.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-PD	Lampung Barat	1	dokumen	16.125.000			1	dokumen	20.000.000
1.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA PD	Lampung Barat	1	dokumen	12.855.000			1	dokumen	20.000.000
1.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-PD	Lampung Barat	1	dokumen	12.855.000			1	dokumen	20.000.000
1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	Lampung Barat	1	laporan	6.160.000			1	laporan	8.000.000
1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lampung Barat	12	laporan	11.880.000			12	laporan	25.000.000
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Lampung Barat	665	orang	47.030.424.159	DAU		692	orang	58.802.599.712

		Lampung Barat	2	laporan				2	laporan	
		Lampung Barat	19	laporan				19	laporan	
		Lampung Barat	2	dokumen				2	dokumen	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Lampung Barat	525	orang	47.001.224.159			550	orang	47.991.883.617
1.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan PD	Lampung Barat	1	dokumen	4.600.000			1	dokumen	4.485.600
1.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi PD	Lampung Barat	1	dokumen	2.700.000			1	dokumen	2.620.000
1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun PD	Lampung Barat	1	laporan	4.000.000			1	laporan	3.950.000
1.02.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Lampung Barat	5	dokumen	3.000.000			5	dokumen	3.050.000
1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran PD	Lampung Barat	18	laporan	11.000.000			18	laporan	16.600.000

1.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan &Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	Lampung Barat	2	dokumen	3.900.000			2	dokumen	3.800.000
		Lampung Barat	1	laporan	3.250.000			1	laporan	3.550.000
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Lampung Barat	21	dokumen	31.000.000			27	dokumen	25.200.000
1.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik daerah pada PD	Lampung Barat	21	laporan	31.000.000			6	laporan	3.550.000
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Lampung Barat	2	dokumen	45.095.600	DAU		2	dokumen	137.071.500
		Lampung Barat	12	orang				12	orang	
1.02.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Lampung Barat	1	dokumen	20.299.200			1	dokumen	55.000.000
1.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Lampung Barat	2	orang	10.000.000			2	orang	10.000.000

1.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Lampung Barat	47	orang	14.796.400			47	orang	12.971.500
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Lampung Barat	10	paket	270.141.800	DAU		10	paket	1.520.120.500
			4	paket				4	paket	
			1	paket				1	paket	
			1	paket				1	paket	
			9	paket				9	paket	
			9	paket				9	paket	
			13	paket				13	paket	
			24	paket				24	paket	
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Lampung Barat	9	paket	13.550.000			9	paket	13.648.000
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Lampung Barat	3	paket	31.210.800			3	paket	47.265.500

1.02.01.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Lampung Barat	9	paket	43.000.000			7	paket	101.500.000
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Lampung Barat	6	dokumen	6.840.000			4	dokumen	4.500.000
1.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Lampung Barat	1	laporan	11.754.000			1	laporan	23.232.000
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD	Lampung Barat	12	laporan	163.787.000			12	laporan	220.000.000

1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Lampung Barat	40	laporan	294.510.400	DAU		40	laporan	915.211.080
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lampung Barat	2	laporan	2.750.000			2	laporan	3.750.000
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lampung Barat	1	laporan	78.800.000			1	laporan	117.850.000
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Lampung Barat	1	laporan	211.960.400			1	laporan	174.611.080
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lampung Barat	121	unit	242.124.000	DAU		121	unit	2.490.540.000
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Lampung Barat	28	unit	177.450.000			28	unit	386.080.000
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kant& Bangunan Lain	Lampung Barat	7	unit	54.814.000			7	unit	55.950.000

1.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Lampung Barat	15	unit	9.860.000			15	unit	18.510.000
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Lampung Barat	16	unit kerja	44.000.000	DAU/BLUD		16	unit kerja	47.945.800.000
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Lampung Barat	15	unit kerja	44.000.000			15	unit kerja	19.945.800.000
		Lampung Barat	1	unit kerja	27.964.114.200			1	unit kerja	28.000.000.000
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Lampung Barat	86	%	128.760.914.781			87	%	75.633.757.700
			100	%				100	%	
			100	%				100	%	
			70	%				72	%	
			95	%				96	%	
			7	%				7	%	
			30	%				40	%	
			78	%				80	%	

			78	%				80	%	
			100	%				100	%	
			100	%				100	%	
			100	%				100	%	
			58	%				60	%	
			100	%				100	%	
			40	%				45	%	
			4	hari				4	hari	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Lampung Barat	100	%	103.934.553.506	DAU/DAK/ DBH		100	%	29.126.037.300
		Lampung Barat	100	%				100	%	
		Lampung Barat	100	%				100	%	
		Lampung Barat	100	%				100	%	
			100	%				100	%	
			100	%				100	%	
			100	%				100	%	
			100	%				100	%	
1.02.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasaran Pendukungnya	Lampung Barat	1	unit	52.896.440.000				unit	

1.02.02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Lampung Barat	3	unit	10.810.000.000					
1.02.02.2.01.04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Lampung Barat	5	unit	1.066.500.000			10 Unit	unit	3.350.000.000
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Lampung Barat	5	unit	1.165.040.000			8 Unit	unit	800.000.000
1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Lampung Barat	11	unit	1.780.120.000			3 Unit	unit	430.000.000
1.02.02.2.01.11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Lampung Barat	8	unit	801.520.000			5 Unit	unit	548.000.000
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Lampung Barat	3	unit	10.810.000			4	unit	2.000.000.000

1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Lampung Barat	1362	unit	30.527.689.861			50	unit	2.000.000.000
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Lampung Barat	753	unit	385.133.600			292	unit	352.500.000
1.02.02.2.01.23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Lampung Barat	2	paket	4.128.978.045			1	paket	6.000.000.000
1.02.02.2.01.26	Distribusi Alat Kesehatan, Obt, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan & Minuman ke Pusk serta Fasilitas Kesehatan Lain	Lampung Barat	15	paket	103.052.000			12	paket	150.000.000
1.02.02.2.01.24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar melalui Pendekatan Keluarga	Lampung Barat	1175	Keluarga	267.650.000			69276	Keluarga	825.537.300
	Operasional Pelayanan fasilitas Kesehatan Lainnya	Lampung Barat	4	Unit	98.510.000			4	Unit	100.000.000
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota		85	%	24.948.824.275			90	%	45.798.745.400

		Lampung Barat								
			80					83	%	
			80					83	%	
			15	unit				15	unit	
			220.000	orang				230.000	orang	
			100	%				100	%	
			4	jenis				4	jenis	
			100	%		DAU/ DAK/ DBH		100	%	
			100	%				100	%	
			100	%				100	%	
			80	%				85	%	
			100	%				100	%	
			100	%				100	%	
			100	%				100	%	
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Lampung Barat	350	orang	69.450.000			400	orang	2.602.814.200

1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Ibu Bersalin	Lampung Barat	300	orang	25.000.000			300	orang	640.000.000
1 02 02 2.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Lampung Barat	1425	bayi	18.000.000			2850	bayi	427.500.000
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Lampung Barat	6.350	balita	32.000.000			12700	balita	314.400.000
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Lampung Barat	50.500	orang	130.000.000			1	dokumen	165.000.000
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia lanjut	Lampung Barat	300	orang	180.000.000			375	orang	275.000.000
1 02 02 2.02 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Lampung Barat	18.000	orang	35.000.000			18000	orang	165.000.000
1 02 02 2.02 09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Lampung Barat	3.000	orang	354.242.188			3000	orang	165.000.000
2 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Lampung Barat	517	orang	85.000.000			520	orang	265.000.000
2 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Lampung Barat	5000	orang	420.113.850			3000	orang	304.511.000
2 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Risiko Teronfeksi HIV	Lampung Barat	4.000	orang	95.943.540			4100	orang	144.894.500
2 02 02 2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Lampung Barat	1	Dokumen	150.000.000					
1 02 02 2.02 14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan /atau Berpotensi Bencana	Lampung Barat	1	dokumen				1	dokumen	9.600.000.000
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Gizi Masyarakat	Lampung Barat	1	dokumen	33.169.500			1	dokumen	4.207.911.100
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Lampung Barat	1	dokumen	22.500.000			1	dokumen	25.000.000

1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Lampung Barat	2	dokumen	548.975.000			1	dokumen	50.000.000
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Lampung Barat	1	dokumen	464.895.500			1	dokumen	143.158.400
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Lampung Barat	1	dokumen	126.380.000			1	dokumen	2.900.000.000
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Lampung Barat		orang					orang	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Lampung Barat	1	dokumen	75.000.000			1	dokumen	55.000.000
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Lampung Barat	3	dokumen				3	dokumen	504.000.000
1.02.02.2.02.24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Lampung Barat	1	dokumen	230.000.000			2	dokumen	700.000.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Lampung Barat	1	dokumen	877.549.517			1	dokumen	2.488.889.200
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Lampung Barat	1	dokumen	17.068.961.880			2	dokumen	6.944.400.000
1.02.02.2.02.27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Lampung Barat	0	orang	-			100	orang	150.000.000

1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium	Lampung Barat	70	paket	49.500.000			20	paket	85.000.000
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Lampung Barat	1	dokumen	32.500.000			1	dokumen	40.000.000
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Lampung Barat	1	dokumen	31.140.000			1	dokumen	45.000.000
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Lampung Barat	0	unit	-			1	unit	5.000.000.000
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Lampung Barat	1	dokumen				1	dokumen	999.967.000
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Lampung Barat	1	dokumen	98.510.000			1	dokumen	150.000.000
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kab./Kota	Lampung Barat	15	unit	421.960.000			17	unit	888.300.000
1.02.02.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)PSC 119	Lampung Barat	1	unit	2.791.350.000			1	unit	3.800.000.000
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Lampung Barat	400	orang	45.000.000				orang	
1.02.02.2.02.41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Lampung Barat	10	orang	47.550.000				orang	

1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Lampung Barat	200	orang	107.167.800				orang	
1.02.02.2.02.43	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Lampung Barat	3	orang	80.000.000				orang	
1.02.02.2.02.46	Pengelolaan Kesehatan Ibu dan anak	Lampung Barat	6350	Balita	185.935.500					
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Lampung Barat	3	dokumen	42.537.000	DAU/DAK/ DBH		3	dokumen	205.000.000
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Lampung Barat	1	dokumen	42.537.000			1	dokumen	45.000.000
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Lampung Barat	1	dokumen				1	dokumen	10.000.000
1.02.02.2.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Lampung Barat	5					6		120.000.000
1.02.02.2.03.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Lampung Barat	1	dokumen	16.230.000,00					
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasyankes Tingkat Kab /Kota	Lampung Barat	24	%		DAU/DAK/ DBH		24	unit	503.975.000
1 02 02 2.04 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit kelas C, D dan Fasilitas kesehatan lainnya	Lampung Barat	1	Dokumen	25.000.000			25	unit	12.975.000
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Lampung Barat	15	unit (puskesmas)				15	unit (puskesmas)	252.000.000
1.02.02.2.04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Yankes Rujukan	Lampung Barat	1	dokumen				1	dokumen	200.000.000
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Lampung Barat	60	%				65	%	14.679.477.000
			100					100	%	

			100					100	%	
1.02.03.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kab/Kota	Lampung Barat	3	dokumen		DAU/ DAK/ DBH		3	dokumen	22.975.000
1 02 03 2.01 01	Pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan	Lampung Barat	1	dokumen	5.000.000			1	dokumen	10.000.000
1 02 03 2.01 02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik nakes	Lampung Barat	1	dokumen	35.000.000			2	dokumen	12.975.000
1.02.03.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kab/Kota	Lampung Barat	1	dokumen		DAU/ DAK/ DBH		1	dokumen	14.362.002.000
			437	orang				439	orang	
			1	dokumen				1	dokumen	
1 02 03 2.02 01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan SDM Kesehatan	Lampung Barat	1	dokumen	40.000.000			5	dokumen	20.000.000
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia kesehatan sesuai standard	Lampung Barat	275	orang	3.447.285.200			275	orang	6.704.027.000
		Lampung Barat	162	orang				164	orang	7.625.000.000
1 02 03 2.02 03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia kesehatan	Lampung Barat	2	dokumen				2	dokumen	12.975.000
1.02.03.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Tekhnis SDM Kesehatan Tingkat Daerah Kab /Kota	Lampung Barat	190	orang		DAU/ DAK/ DBH		192	orang	294.500.000

1 02 03 2.03 01	Pengembangan Mutu dan peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Lampung Barat	150	orang	1.002.043.000			150	orang	250.000.000
		Lampung Barat	40	orang				42	orang	44.500.000
1.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Lampung Barat	75	%	348.000.000			80	%	365.000.000
			100	%				100	%	
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Lampung Barat	49	%		DAU/ DAK/ DBH		50	%	52.500.000
1.02.04.2.01.01	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Lampung Barat	1	dokumen	107.154.000			1	dokumen	17.500.000
1.02.04.2.01.02	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Lampung Barat	28	sarana				29	sarana	35.000.000
1.02.03.2.02	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Lampung Barat	40	%		DAU/ DAK/ DBH		41	%	125.000.000

1.02.04.2.02.01	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Lampung Barat	1	dokumen	115.285.000.			1	dokumen	125.000.000
1.02.03.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Lampung Barat	100	%		DAU/ DAK/ DBH		100	%	30.000.000
1.02.03.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Lampung Barat	1	dokumen				1	dokumen	30.000.000
1.02.03.2.05	Penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	Lampung Barat	100	%		DAU/ DAK/ DBH		100	%	20.000.000
1.02.03.2.05.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	Lampung Barat	1	dokumen				1	dokumen	20.000.000
1.02.03.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada produksi dan produk makanan minuman IRT	Lampung Barat	40	%		DAU/ DAK/ DBH		41	%	137.500.000
1.02.04.2.06.01	Sub Kegiatan Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Lampung Barat	34	unit	178.305.000			28	unit	120.000.000
1.02.04.2.06.02	Subkegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Lampung Barat	1	dokumen				1	dokumen	17.500.000

1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Lampung Barat	35	%				40	%	2.867.917.700
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemintraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kab/Kota	Lampung Barat	1	%	88.532.000	DAU/ DAK/ DBH		1	%	1.297.501.000
1.02.05.2.01.01	Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat	Lampung Barat	1	dokumen	88.532.000			1	dokumen	1.297.501.000
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif, Preventif Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Lampung Barat	1	dokumen		DAU/ DAK/ DBH		1	dokumen	
		Lampung Barat	300	Keluarga				300	Keluarga	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Lampung Barat	1	dokumen	29.470.000			1	dokumen	35.000.000
1.02.05.2.02.02	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Lampung Barat	300	Keluarga				350	Keluarga	53.921.000
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Lampung Barat	1	dokumen	94.376.000	DAU/ DAK/ DBH		1	dokumen	17.299.700
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Tekhnis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	Lampung Barat	1	dokumen	94.376.000			1	dokumen	17.299.700

Rumah sakit Alimuddin Umar

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
		Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
			Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan							
	RSUD Alimuddin Umar					44.390.345.595,00					49.737.974.050,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					44.390.345.595,00					49.737.974.050,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					44.390.345.595,00					49.737.974.050,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					38.826.707.495,00					39.013.974.050,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					41.987.500,00					45.000.000,00	
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	-	2 dokumen Dokumen	-	5.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen Dokumen	6.500.000,00	
1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	-	1 dokumen Dokumen	-	7.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen Dokumen	8.000.000,00	
1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											

		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	-	1 dokumen Dokumen	-	4.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen Dokumen	5.000.000,00
1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD										
		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	-	1 dokumen Dokumen	-	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen Dokumen	5.500.000,00
1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD										
		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	-	1 dokumen Dokumen	-	5.987.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen Dokumen	5.000.000,00
1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										

		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	-	1 dokumen Laporan	-	4.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen Laporan	5.000.000,00
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	-	12 laporan Laporan	-	9.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 laporan Laporan	10.000.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					10.777.775.995,00					10.778.360.495,00
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	-	146 Orang/bulan	-	10.764.860.495,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	146 Orang/bulan	10.764.860.495,00
1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	-	2 Laporan	-	4.365.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	4.500.000,00
1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										

		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	-	18 Laporan	-	4.800.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	5.000.000,00
1.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran										
		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	3.750.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	4.000.000,00
1.02.01.2.05.0005	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					61.150.000,00					88.939.000,00
1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai										
		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	8.650.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	28.939.000,00
1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	-	10 Orang	-	52.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	60.000.000,00
1.02.01.2.06.0001	Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.149.318.000,00					1.063.000.000,00
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										

		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	-	1 Paket	-	60.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	65.000.000,00
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	-	1 Paket	-	269.860.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	220.000.000,00
1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	-	1 Paket	-	200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	210.000.000,00
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	-	1 Paket	-	225.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	230.000.000,00
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	-	2 Paket	-	275.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	280.000.000,00
1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										

		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	-	5 Dokumen	-	5.040.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	7.000.000,00
1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	7.683.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	9.000.000,00
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	106.735.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	42.000.000,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					155.025.000,00					176.225.555,00
1.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	-	1 Unit	-	36.225.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	36.225.555,00
1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	-	2 Unit	-	118.800.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	140.000.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					558.118.000,00					674.500.000,00
1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										

		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	4.200.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.500.000,00
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	524.998.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	550.000.000,00
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	28.920.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	120.000.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.070.165.000,00					1.233.000.000,00
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	-	16 Unit	-	178.075.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	288.000.000,00
1.02.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar										
		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	-	3 Unit	-	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	3 Unit	100.000.000,00

1.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel										
		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	-	30 Unit	-	75.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit	100.000.000,00
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	-	5 Unit	-	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	100.000.000,00
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	-	6 Unit	-	207.090.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	220.000.000,00
1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	-	26 Unit	-	410.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	26 Unit	425.000.000,00
	Peningkatan Pelayanan BLUD					25.013.168.000,00					24.954.949.000,00
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD										
		Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Unit Kerja	-	25.013.168.000,00	Pendapatan dari BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	24.954.949.000,00
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					2.512.263.100,00					2.849.000.000,00

	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					1.589.848.600,00					1.850.000.000,00
1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit										
		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	-	35 Unit	-	399.810.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	35 Unit	500.000.000,00
1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan										
		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	-	2 Unit	-	105.300.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	2 Unit	100.000.000,00
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan										
		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	-	10 Unit	-	899.738.600,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	10 Unit	1.000.000.000,00
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan										

		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	-	35 Unit	-	185.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	35 Unit	250.000.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					843.560.500,00					911.000.000,00
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan										
		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	92.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	95.000.000,00
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA										
		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	-	1 dokumen Orang	-	50.007.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1 dokumen Orang	65.000.000,00
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat										
		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	-	12 Dokumen	-	378.985.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	400.000.000,00
1.02.02.2.02.0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan										

		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	-	1 fasilitas Unit	-	87.655.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	1 fasilitas Unit	106.000.000,00
1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit										
		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	74.994.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	80.000.000,00
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota										
		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	-	1 fasilitas Unit	-	159.919.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	1 fasilitas Unit	165.000.000,00
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi					38.989.000,00					40.000.000,00
1.02.02.2.03.2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan										
		Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Dokumen	-	38.989.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0 Dokumen	40.000.000,00
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					39.865.000,00					48.000.000,00
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan										

		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	-	1 Unit	-	39.865.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	1 Unit	48.000.000,00
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					3.051.375.000,00					7.875.000.000,00
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota					3.006.375.000,00					7.825.000.000,00
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar										
		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	-	168 Orang	-	3.006.375.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	168 Orang	7.825.000.000,00
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					45.000.000,00					50.000.000,00
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	-	45 Orang	-	45.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	45 Orang	50.000.000,00
						44.390.345.595,00					49.737.974.050,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 RENCANA KERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2025

Rencana Kerja dan kerangka pendanaan perangkat daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat diarahkan untuk memperbaiki status kesehatan masyarakat di Kabupaten Lampung Barat, upaya mencapai SPM bidang kesehatan (termasuk pemulihan pasca pandemi covid 19) serta agenda kerja Bupati Lampung Barat dengan memperhatikan isu-isu global, nasional dan kebijakan Nasional sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel IV.1

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Dinas Kesehatan dan RS Alimudin Umar

Kabupaten Lampung Barat TA 2025

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		
			Target 2025		Pagu Indikatif
1	2	3	4		5
	TUJUAN				
	Mewujudkan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	67,84	Tahun	
	SASARAN				
	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu/100.000 KH	110	/100.000 KH	
		Angka Kematian Bayi/1.000 KH	3,9	/1.000 KH	
		Persentase Balita Stunting	10,94	%	
		Indeks Kepuasan Masyarakat	86	%	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/ KOTA	Nilai SAKIP OPD	79,05	poin	123.850.857.637
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11	dokumen	
		Jumlah dokumen Penganggaran Daerah yang disusun	5	dokumen	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	dokumen	
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11	dokumen	18.420.000
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RSUD AU)	2	dokumen	5.500.000

1.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1	dokumen	12.855.000
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD (RSUD AU)	1	dokumen	7.500.000
1.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1	dokumen	16.125.000
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD (RSUD AU)	1	dokumen	4.500.000
1.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	1	dokumen	12.855.000
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD (RSUD AU)	1	dokumen	5.000.000
1.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	1	dokumen	12.855.000
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD (RSUD AU)	1	dokumen	5.987.500
1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	laporan	6.160.000
		Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD (RSUD AU)	1	dokumen	4.500.000
1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	laporan	11.880.000
		Jumlah dokumen Evaluasi kinerja (RSUD Alimuddin Umar)	12	laporan	9.000.000
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	665	orang	62.165.883.253
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	laporan	
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD & Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	19	laporan	
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2	dokumen	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	525	orang	47.001.224.159
		Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN (RSUDAU)	146	orang	10.777.775.995
1.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan & pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	1	dokumen	4.600.000
1.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	1	dokumen	2.700.000

1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1	laporan	4.000.000
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD (RSUD AU)	2	laporan	4.365.500
1.02.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	5	dokumen	3.000.000
1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD & Laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan /triwulanan /semesteran SKPD	18	laporan	11.000.000
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD (RSUD AU)	18	laporan	4.800.000
1.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	2	dokumen	3.900.000
		Jumlah dokumen Pelaporan & Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (RSUD AU)	1	laporan	3.750.000
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	27	dokumen	31.000.000
1.02.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	dokumen	
1.02.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	dokumen	
1.02.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1	laporan	
1.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	laporan	
1.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD	6	laporan	31.000.000
1.02.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1	dokumen	
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2	dokumen	139.167.050
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12	orang	
1.02.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	dokumen	20.299.200
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai RSUD AU	1	dokumen	8.650.000
1.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	2	orang	10.000.000

		Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Berdasarkan Tugas dan Fungsi (RSUD AU)	10	orang	52.500.000
1.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	47	orang	14.796.400
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	10	paket	3.787.841.926
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	paket	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	paket	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	paket	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	9	paket	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	9	paket	
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	13	paket	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24	paket	
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	9	paket	13.550.000
		Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (RSUD AU)	1	paket	60.000.000
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3	paket	31.210.800
		Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (RSUD AU)	1	paket	269.860.000
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (RSUD AU)	1	paket	200.000.000
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor (RSUDAU)	1	paket	225.000.000
1.02.01.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	7	paket	43.000.000
		Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (RSUD AU)	2	paket	275.000.000
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	4	dokumen	6.840.000
		Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan (RSUD Alimuddin Umar)	5	dokumen	5.040.000
1.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitas Kunjungan Tamu/makan minum tamu yang dipenuhi	1	laporan	11.754.000
		Jumlah laporan Fasilitas Kunjungan Tamu/makan minum tamu yang dipenuhi (RSUD AU)	12	laporan	7.683.000

1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	laporan	163.787.000
		Jumlah laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan (RSUD AU)	12	laporan	106.735.000
1.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	dokumen	
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	3	unit	
1.02.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (RSUDAU)	Jumlah unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan (RSUD AU)	1	unit	36.225.000
1.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (RSUD Alimuddin Umar)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (RSUD AU)	2	unit	118.800.000
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disusun dan disediakan	40	laporan	962.457.188
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	laporan	2.750.000
		Jumlah laporan Surat Menyurat (RSUD AU)	12	laporan	4.200.000
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1	laporan	78.800.000
		Jumlah laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (RSUD AU)	12	laporan	524.998.000
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor disediakan	1	laporan	211.960.000
		Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (RSUD AU)	12	laporan	28.920.000
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	121	unit	4.891.011.400
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	28	unit	177.450.000
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara , Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinannya (RSUD AU)	16	unit	178.075.000
1.02.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar (RSUD Alimuddin Umar)	Jumlah perijinan dan pemeliharaan alat besar Lainnya yang disediakan	3	unit	100.000.000
1.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (RSUD AU)	15	unit	75.000.000
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (RSUD AU)	5	unit	1000.000.000

1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kant& Bangunan Lain	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ rehabilitasi	7	unit	54.814.000
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara/ rehabilitasi (RSUD AU)	6	unit	207.090.000
1.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ rehabilitasi	15	unit	9.860.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor / Bangunan Lain yang dipelihara (RSUD AU)	26	unit	410.000.000
1.02.01.2.09.12	Pemeliharaan /Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	1	ha	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Peningkatan Pelayanan Unit Kerja BLUD	16	unit kerja	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	15	unit kerja	44.000.000
		Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (RSUD AU)	1	unit kerja	25.013.168.000
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian SPA Puskesmas	86	%	191.043.929.042
		Persentase Puskesmas terakreditasi madya	100	%	
		Persentase FKTP & FKTL melaksanakan SISROUTE	100	%	
		% Masyarakat memiliki JKN	70	%	
		%persalinan di fasyankes	95	%	
		Prevalensi Balita Wasting	7	%	
		Persentase capaian 5 pilar STBM	30	%	
		Persentase Capaian Pencegahan Penyakit Menular	78	%	
		Persentase Capaian Pencegahan Penyakit Tidak Menular	78	%	
		Persentase Capaian IDL	100	%	
		Persentase Puskesmas melaksanakan SIK	100	%	
		Akreditasi RSUD AU Utama	100	%	
		Persentase Capaian SPA RSUDAU	58	%	
		Persentase Sarana Fasilitas Pelayanan yang tersedia dan terpelihara	100	%	
		BOR RSUDAU	40	%	
		ALOS RSUD AU	4	hari	
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Persentase tersedia dan terpeliharanya sarana penunjang pelayanan kesehatan RSUD AU	100	%	
		Persentase Tersedianya Obat dan BHP RSUDAU	100	%	
		Persentase tersedia dan terpeliharanya sarana prasarana RSUD AU	100	%	

1.02.02.2.01	Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas mendapatkan penyediaan dan pemeliharaan SPA	100	%	
		Persentase ketersediaan rasio tempat tidur RS/1000 penduduk	100	%	
		Persentase tersedianya Obat, Vaksin dan BHP Puskesmas	100	%	
		Persentase Puskesmas dan Faskes Lainnya menerima distribusi obat, vaksin dan BHP	100	%	
		Persentase Puskesmas melaksanakan PIS-PK	100	%	
1.02.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasaran Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1	unit	52.896.440.000
1.02.02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Faskes Lainnya yang dibangun	1	unit	
1.02.02.2.01.04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	5	unit	1.066.500.000
1.02.02.2.01.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit (RSUD AU)	35	unit	399.810.000
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	7	unit	1.165.040.000
1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	11	unit	1.780.120.000
1.02.02.2.01.11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	8	unit	801.520.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan (RSUDAU)	2	unit	105.300.000
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	3	unit	10.810.000.000
		Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan (RSUD AU)	2	unit	
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana dan pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	12	unit	
		Jumlah Prasarana dan pendukung Fasyankes yang Disediakan (RSUD AU)	3	unit	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1.362	unit	
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan (RSUD AU)	10	unit	899.738.600
1.02.02.2.01.16	Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah obat dan vaksin yang disediakan	1	paket	2.451.135.045

		Jumlah Obat, Vaksin yang disediakan (RSUD AU)	1	paket	
1.02.02.2.01.17	Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah bahan habis pakai yang disediakan	1	paket	1.677.843.000
		Jumlah Bahan Habis Pakai yang disediakan (RSUD AU)	1	paket	
1.02.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RSUD Alimuddin Umar)	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan (RSUDAU)	2	unit	
1.02.02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RSUDAU)	Jumlah Prasarana dan pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan (RSUDAU)	2	unit	
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpeliharaan Sesuai Standar	753	unit	
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (RSUD AU)	20	unit	185.000.000
1.02.02.2.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obt, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan & Minuman ke Pusk serta Fasilitas Kesehatan Lain	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obt, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	15	Puskesmas	103.052.000
1.02.02.2.01.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang sudah dikunjungi dan di intervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatn Puskesmas	1.175	Keluarga	267.650.000
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Nilai SPM KIA Gizi	75	%	
		Nilai SPM Penyakit Menular	80		
		Nilai SPM Penyakit Tidak Menular dan ODGJ	80		
		Jumlah Puskesmas Terakreditasi	15	unit	
		Jumlah Peserta JKN	220.000	orang	
		Persentase Puskesmas terintegrasi PSC 119	100	%	
		Jumlah Jenis media yang digunakan dalam promosi kesehatan	4	jenis	
		Persentase Puskesmas melaksanakan program 5 pilar stbm	100	%	
		Persentase Puskesmas melaksanakan surveilans kesehatan	100	%	
		Persentase Faskes lainnya mendapatkan operasional	100	%	
		Nilai SPM (RSUD AU)	80	%	
		Persentase pengelolaan pelayanan Rawat Jalan RSUD AU	100	%	
		Persentase pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat dan operasional pelayanan RS	100	%	
		Persentase pelaksanaan pengelolaan upaya kesehatan khusus (RSUD AU)	100	%	

1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	350	orang	69.450.000
		Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (puskesmas)	15	Puskesmas	545.886.000
1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	300	orang	25.000.000
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas)	15	Puskesmas	100.124.000
1 02 02 2.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1425	bayi	18.000.000
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6.350	balita	32.000.000
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia Sekolah Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (puskes)	5.000	anak	363.509.500
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapat kan pelayanan kesehatan sesuai standar	50.500	orang	130.000.000
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	300	orang	180.000.000
1 02 02 2.02 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	18.000	orang	35.000.000
1 02 02 2.02 09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3.000	orang	354.242.188
2 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah ODGJ Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	517	orang	85.000.000
2 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis Yang Mendapatkan Pelayanan Esuai Standar	5.000	orang	420.113.850
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis Yang Mendapatkan Pelayanan Esuai Standar (Puskesmas)	15	Unit	259.100.000
2 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV Yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	4.000	orang	95.943.540
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV Yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Puskesmas)	15	Unit	67.800.000
1 02 02 2.02 14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan /atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai standar	1	dokumen	150.000.000
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	dokumen	33.169.500
		Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas)	15	Unit	3.094.479.100

1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah dokumen hasil pengelola pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	1	dokumen	22.500.000
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil pengelola pelayanan kesehatan lingkungan	1	dokumen	50.000.000
		Jumlah dokumen hasil pengelola pelayanan kesehatan lingkungan	1	dokumen	498.975.000
		Jumlah dokumen hasil pengelola pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas)	15	unit	64.500.000
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan pelayanan Promosi kesehatan	5	media	464.895.500
		Jumlah dokumen Pelayanan Promosi Kesehatan yang disediakan (RSUD Alimuddin Umar)	1	dokumen	92.000.000
1 02 02 2.02 19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	2	dokumen	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	dokumen	126.380.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Puskesmas)	15	unit	520.138.500
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) yang terlayani	45	orang	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (RSUD Alimuddin Umar)	1	dokumen	50.007.000
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	3	dokumen	
		Jumlah dokumen laporan pengelolaan upaya kesehatan khusus (RSUD AU)	1	dokumen	
1.02.02.2.02.24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan & Pasca Krisis Kesehatan	1	dokumen	230.000.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Dan Tidak Menular	1	dokumen	877.549.517
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	dokumen	17.068.961.880
		Jumlah dokumen laporan Pengelolaan Jamkesmas (RSUD AU)	12	dokumen	378.985.000
1.02.02.2.02.27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah orang yang menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan Napza di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) dan sekolah	0	orang	
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	70	paket	49.500.000

1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan kabupaten/kota sehat	1	dokumen	32.500.000
1.02.02.2.02.30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang melayani konsultasi jarak jauh antar Fasyankes melalui Pelayanan <i>Telemedicine</i> untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas	11	fasilitas	
		Terlaksananya pelayanan Telemedicine di RSUD Alimuddin Umar	1	fasilitas	87.655.500
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	0	unit	
		Jumlah dokumen Operasional Pelayanan RS (RSUD Alimuddin Umar)	1	dokumen	74.994.000
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1	dokumen	
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	4	dokumen	98.510.000
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kab./Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota yang terakreditasi	15	unit	421.960.000
1.02.02.2.02.36	Investigasi awal Kejadian Tidak diharapkan (KIPI) dan pemberian obat massal	Jumlah dokumen Hasil Investigasi awal kejadian Tidak Diharapkan (KIPI dan pemberian Obat Massal)	1	Dokumen	31.140.000
		Jumlah dokumen Hasil Investigasi awal kejadian Tidak Diharapkan (KIPI dan pemberian Obat Massal) puskesmas	15	Unit	51.000.000
		Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota yang terakreditasi (RSUD AU)	1	fasilitas	159.919.000
1.02.02.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah <i>Public Safety Center</i> (PSC119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPDGT)	10	unit	2.791.350.000
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas		orang	
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	400	orang	45.000.000
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Puskesmas)	15	unit	214.500.000
1.02.02.2.02.41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10	orang	47.550.000
		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Puskesmas)	15	Unit	19.000.000

1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	200	orang	107.167.800
1.02.02.2.02.43	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	3	orang	80.000.000
1.02.02.2.02.43	Koordinasi dan sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten /Kota	1	Dokumen	16.230.000
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	3	dokumen	
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	1	dokumen	42.537.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan (Puskesmas)	15	unit	2.258.834.400
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan (RSUD Alimuddin Umar)	1	dokumen	38.989.000
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1	dokumen	
1.02.02.2.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang disediakan	5		
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasyankes Tingkat Kab /Kota	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Kabupaten/Kota mendapatkan penerbitan izin	24	%	
1 02 02 2.04 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit kelas C, D dan Fasilitas kesehatan lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan kesehatan yang dikendalikan, Diawasi dan ditindaklanjuti Perizinannya	1	unit	25.000.000
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu Fasilitas Kesehatan	15	unit (puskesmas)	
		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu Fasilitas Kesehatan (RSAU)	1	unit	39.865.000
1.02.02.2.04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Yankes Rujukan	Jumlah Dokumen hasil penyiapan perumusan dan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1	dokumen	
1.02.02.2.04.46	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Ibu hamil dan Balita yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	350 6.350	Ibu hamil Balita	185.935.500 -
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Fasyankes memenuhi SDMK sesuai Standart	60	%	
		Persentase SDMK RSUDAU yang memenuhi standart	100		-
		Persentase Nakes RSUDAU yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya	100		-
1.02.03.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	3	dokumen	

1 02 03 2.01 01	Pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik tenaga kesehatan	1	dokumen	5.000.000
1 02 03 2.01 02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik nakes	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan	1	dokumen	35.000.000
1.02.03.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	dokumen	
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang terpenuhi Sesuai Standar	437	orang	
		Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	dokumen	
1 02 03 2.02 01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan SDM Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Perencanaan dan Distribusi serta pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	dokumen	40.000.000
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia kesehatan sesuai standar	Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	275	orang	3.447.285.200
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi Standar di Fasyankes (RSUD AU)	168	orang	3.006.375.000
1 02 03 2.02 03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia kesehatan	2	dokumen	
1.02.03.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Tekhnis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kab /Kota	Jumlah SDM Kesehatan Tingkat Kabupaten/Kota Yang dikembangkan Mutu dan ditingkatkan kompetensinya	190	orang	
1 02 03 2.03 01	Pengembangan Mutu dan peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya	150	orang	1.002.043.000
		Jumlah SDM Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya (RSUD AU)	45	orang	45.000.000
1.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Sarana Distribusi Serta Produk Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	75	%	
		Persentase Pemeriksaan Laik Hygine Sentra Produksi dan Distribusi Makanan	100	%	
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alkes dan Optikal, serta UMOT yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	49	%	
1.02.04.2.01.01	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1	dokumen	107.154.000

1.02.04.2.01.02	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT) yang dikendalikan dan diawasi dalam rangka penerbitan dan tindak lanjut penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)		sarana	
1.02.03.2.02	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase SPPIRT yang diterbitkan sesuai ketentuan	40	%	
1.02.04.2.02.01	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor PIRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	1	dokumen	115.285.000
1.02.03.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	100	%	
1.02.03.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1	dokumen	
1.02.03.2.05	Penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	Persentase Penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	100	%	
1.02.03.2.05.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	1	dokumen	
1.02.03.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga	Persentase sarana produksi IRTTP yang memenuhi ketentuan	40	%	
1.02.04.2.06.01	Sub Kegiatan Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah produk dan sarana produksi makanan minuman industri rumah tangga beredar yang dilakukan pemeriksaan post market dalam rangka tindak lanjut pengawasan	27	unit	178.305.000
1.02.04.2.06.02	Subkegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Jumlah data perizinan industri rumah tangga yang dikelola dalam rangka tindak lanjut pengawasan	1	dokumen	

1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Keluarga berPHBS	35	%	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat	1	%	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat	Jumlah dokumen promosi kesehatan,advokasi,kemitraan,dan pemberdayaan masyarakat	1	dokumen	88.532.000
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif, Preventif Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1	dokumen	
		Jumlah Keluarga melaksanakan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	300	Keluarga	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bessih dan sehat	1	dokumen	
1.02.05.2.02.02	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluargadan lingkungan dengan ber PHBS	1	Dokumen	29.470.000
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Tekhnis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	1	dokumen	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Tekhnis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil BIMTEK DAN Supervisi UKBM	1	dokumen	94.376.000
		Jumlah dokumen hasil BIMTEK DAN Supervisi UKBM puskesmas	15	unit	222.452.000

Tabel IV.2
Detail Sub Kegiatan Tahun 2025

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Detail Khusus Sub Kegiatan Tahun 2025
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan terdiri dari Dokumen Renstra, Cascading, Pohon Kinerja, Renja, Perubahan Renja, Kerangka Acuan Kerja, Perjanjian Kinerja, Perjanjian Kinerja Perubahan, Rencana Aksi, Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara dan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara Perubahan
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RSUD AU)	Penyusunan Dokumen Perencanaan terdiri dari Dokumen Renstra, Cascading, Pohon Kinerja, Renja, Perubahan Renja, Kerangka Acuan Kerja, Perjanjian Kinerja, Perjanjian Kinerja Perubahan, Rencana Aksi, Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara dan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara Perubahan
1.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA dilaksanakan berdasarkan usulan masing-masing program dan melalui koordinasi dengan TAPD
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (RSUD AU)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA dilaksanakan berdasarkan usulan masing-masing program dan melalui koordinasi dengan TAPD
1.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA dilaksanakan berdasarkan usulan masing-masing program melalui koordinasi dengan TAPD
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (RSUD AU)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan dilaksanakan berdasarkan usulan masing-masing program melalui koordinasi dengan TAPD
1.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA dilaksanakan setelah dilakukan pembahasan RKA bersama dengan TAPD
	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD (RSUD AU)	Koordinasi dan Penyusunan DPA dilaksanakan setelah dilakukan pembahasan RKA bersama dengan TAPD

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Detail Khusus Sub Kegiatan Tahun 2024
1.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA dilaksanakan setelah dilakukan pembahasan RKA bersama dengan TAPD
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (RSUD AU)	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA dilaksanakan setelah dilakukan pembahasan RKA bersama dengan TAPD
1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dilaksanakan berdasarkan data target dan realisasi kinerja dari masing-masing program dan dilakukan pembahasan dengan program terkait dalam satu tahun anggaran
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (RSUD AU)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dilaksanakan berdasarkan data target dan realisasi kinerja dari masing-masing program dan dilakukan pembahasan dengan program terkait dalam satu tahun anggaran
1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah merupakan penilaian terhadap keberhasilan kinerja organisasi perangkat daerah dalam mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam satu tahun anggaran dan sampai dengan tahun pelaksanaan renstra
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (RSUD AU)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah merupakan penilaian terhadap keberhasilan kinerja organisasi perangkat daerah dalam mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam satu tahun anggaran dan sampai dengan tahun pelaksanaan renstra
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan merupakan kegiatan yang diperuntukkan untuk pembayarn gaji dan tunjangan kinerja bagi pegawai ASN Dinas kesehatan, pegawai 15 Puskesmas & Pegawai Pustu Se-Kabupaten Lampung Barat sejumlah 525 pegawai
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (RSUD AU)	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN dilaksanakan berdasarkan jumlah pegawai RSUD AU yang menerima gaji dan tunjangan
1.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Suatu bentuk kegiatan penatausahaan keuangan dengan memferivikasi: - Semua dokumen pengajuan pencairan dari PPTK (BKP, NPD dan kelengkapan administrasi lainnya) - memferifikasi Dokumen pencairan SPP dan SPM GU-UP-TU dan LS - Memferivikasi semua laporan pertanggungjawaban
1.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Melaksanakan koordinasi ke BPKAD terkait penatausahaan akuntansi yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, yaitu mensinkronkan hasil penjurnalan realisasi anggaran belanja dan realisasi anggaran pendapatan
1.02.01.2.02.05	Koordinasi & Penyusunan Lap.Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi laporan keuangan akhir tahun dengan bidang yang ada di Dinkes dan Puskesmas atas capaian pendapatan dan belanja per program, perkegiatan dan sub kegiatan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun dilaksanakan berdasarkan data target dan realisasi kinerja dari masing-masing program dan dilakukan pembahasan dengan program terkait dalam satu tahun anggaran

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Detail Khusus Sub Kegiatan Tahun 2025
	SKPD (RSUD AU)	
1.02.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Menyiapkan dan mengkoordinasikan ke Bidang2 dan puskesmas yang ada di Dinkes terhadap seluruh bahan tanggapan atas pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim audit
1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Menyusun laporan adminstrasif, fungsional, LRA dll, dan mengkoordinasikan laporan keuangan ke bidang dan Puskesmas per program, kegiatan dan sub kegiatan atas capaian belanja dan pendapatan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (RSUD AU)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD berdasarkan data target dan realisasi kinerja dari masing-masing program dan dilakukan pembahasan dengan program terkait
1.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	Menyusun laporan prognosis berdasarkan realisasi anggaran belanja dan pendapatan dan membuat estimasi realisasi belanja kegiatan per program, kegiatan dan sub kegiatan
	Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran (RSUD AU)	Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran berdasarkan data target dan realisasi Anggaran dari masing-masing program dan dilakukan pembahasan dengan program terkait dalam satu tahun
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
1.02.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Menyusun perencanaan kebutuhan barang milik daerah yaitu mengakomodir rencana kebutuhan barang, baik barang habis pakai ataupun belanja modal
1.02.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Menginventarisir atau melaksanakan pengecekan barang dan aset tetap kemudian mengsinkronkan data antara Kartu inventaris barang (KIB) dengan kondisi dan keberadaan barang baik yang ada di Dinkes, Puskesmas dan Pustu
1.02.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Melaksanakan pembinaan dan monitoring ke Puskesmas terakait penatausahaan aset bagaimana mencatat dan melaporkan barang yang telah di beli
1.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Melaksanakan rekonsiliasi atas laporan barang yang telah disusun oleh pengurus barang Dinkes dengan BPKAD dan rekonsiliasi antara Puskesmas dengan Dinkes
1.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD	Melaksanakan penatausahaan aset yaitu menyusun seluruh laporan barang baik barang habis pakai maupun modal baik secara manual maupun dalam bentuk aplikasi berupa laporan SPPAT, KIB, KIR, laporan persediaan barang, laporan mutasi barang, kartu pemeliharaan, kartu pengeluaran, kartu penerimaan dll)

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Detail Khusus Sub Kegiatan Tahun 2025
1.02.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	- Menertibkan pemanfaatan barang milik daerah agar tidak disalahgunakan oleh penerima manfaat barang misal penggunaan kendaraan Dinas, ditertibkan dengan dibuatkannya SK pengguna kendaraan, berita acara pemakaian kendaraan, surat peminjaman aset apabila ada peminjam dll
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
1.02.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Pembuatan name tag pegawai sebanyak 100 pcs
1.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	pertemuan sinkronisasi dan pengolahan data ASN untuk keperluan administrasi kepegawaian dengan jumlah peserta sebanyak 47 orang terdiri dari 30 org dari puskesmas, 15 orang dinkes, 2 orang UPT IFK
1.02.01.2.05.04	Koordinasi & Pelaksanaan SIMPEG	pertemuan guna desiminasi dan refreshing penerapan sistem informasi kepegawaian dengan jumlah peserta sebanyak 47 orang terdiri dari 30 org dari puskesmas, 15 orang dinkes, 2 orang UPT IFK
1.02.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	penetapan kinerja pegawai sebanyak 1 kali dan monev kepegawaian sebanyak 1 kali
1.02.01.2.05.09	Pendidikan & Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	pendidikan dan pelatihan PNS dengan jumlah pesengiriman peserta sebanyak 10 orang
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi (RSUD AU)	pendidikan dan pelatihan Pegawai RSUD AU dengan jumlah pesengiriman peserta sebanyak 2 orang
1.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	sosialisasi peraturan perundang-undangan terbaru dengan jumlah peserta sebanyak 47 orang terdiri dari 30 org dari puskesmas, 15 orang dinkes, 2 orang UPT IFK
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	penyediaan komponen instalasi listrik seperti lampu, kabel, sakelar sebanyak 9 jenis
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor RSUD AU	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor , mencukupi kebutuhan penerangan/peralatan listrik kantor
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor seperti laptop, sound system, dll sebanyak 4 unit
	Penyediaan Peralatan &	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor , penyediaan bahan-bahan perlengkapan kantor guna penunjang pelayanan RS

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Detail Khusus Sub Kegiatan Tahun 2024
	Perlengkapan Kantor (RSU AU)	
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (RSUD AU)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga , kegiatan yang mendukung penyediaan peralatan rumah tangga berupa alat tenun dan instalasi gizi
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (RSUD AU)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor ,penyediaan bahan bahan logistik kantor, guna penunjang pelayanan rs
1.02.01.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	penyediaan bahan cetak dan penggandaan sebanyak 7 jenis (amplop, kertas kop, map, blangko disposisi, sticker kode barang, kalender/block note)
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (RSUD AU)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan , kegiatan pengadaan cetak rekam medis pasien
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	pembayaran langganan surat kabar harian umum sebanyak 4 SKHU (Lampung post, tribun lampung, radar lampung, radar lambar)
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (RSUD AU)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan jumlah surat kabar, majalah , langganan jurnal yang masuk ke RSUD AU setiap bulan
1.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	makan minum kunjungan tamu dilaksanakan tentative dalam kurun waktu 12 bulan
	Fasilitasi Kunjungan Tamu (RSUD AU)	Fasilitasi Kunjungan Tamu berdasarkan banyaknya kunjungan tamu yang datang ke RSUD AU
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi berupa perjalanan dinas dilakukan baik di dalam daerah maupun luar daerah kabupaten
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (RSUD AU)	Rapat Koordinasi dan Konsultasi berupa perjalanan dinas dilakukan baik di dalam daerah maupun luar daerah kabupaten
1.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pertemuan Sosialisasi Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (peserta 100 orang) dan pengadaan software dan hardware
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Detail Khusus Sub Kegiatan Tahun 2024
	Daerah	
1.02.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya(RSUD AU)	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, pengadaan gedung bangunan
1.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (RSUD AU)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, guna mendukung gedung admisntrasi maupun gedung kesehatan dan alat kesehatan
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	penyediaan materai
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (RSUD AU)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat berdasarkan jumlah materai dan ongkos pengiriman paket setiap bulan
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	pembayaran rekening listrik dinkes sebanyak 3 rekening, pembayaran rekening listrik puskesmas lama sebanyak 18 rekening; pembayarana internet sebanyak 5 rekening, pembayaran telepon sebanyak 1 rekening dan pembayaran air sebanyak 1 rekening
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (RSUD AU)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik berdasarkan jumlah pemakaian listrik, telpon, internet dan air setiap bulannya
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	penyediaan alat-alat kebersihan kantor sebanyak 16 jenis, ATK sebanyak 20 jenis dan upah tenaga kebersihan sebanyak 3 orang
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (RSUD AU)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Honorarium penanggung jawaban pengelola keuangan
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, & Pajak Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	penyediaan BBM, servis, suku cadang dan pajak kendaraan dinas sebanyak 8 mobil dan 20 motor
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, & Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Detail Khusus Sub Kegiatan Tahun 2024
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, & Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (RSUD AU)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan berdasarkan berapa besar pajak yang dibayarkan pada setiap kendaraan baik roda empat maupun roda dua
1.02.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan & Perizinan Alat Besar (RSUD AU)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar , untuk alat besar, seperti genset dan oxigen generator, dll
1.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	
	Pemeliharaan Mebel (RSAU)	Pemeliharaan Mebel , pengdaan meubel dan furniture
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (RSUD AU)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, guna memelihara peralatan dan mesin lainnya
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor & Bangunan Lainnya	pemeliharaan gedung sebanyak 6 gedung (gedung A, gedung B, gedung C, gedung D, gedung E, gedung F)
	Pemeliharaan/Rehab Gedung Bangunan Lain (RSAU)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, rehab gedung kantor
1.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	pembelian BBM 1 unit genset dan pemeliharaan komputer sebanyak 1 unit dan laptop sebanyak 9 unit
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (RSUD AU)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya berdasarkan bahan habis pakai dan jasa cleaning servise kebersihan RSUD AU
1.02.01.2.09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Pemeliharaan/Rehabilitasi berupa pemasangan bronjong/penahan longsor pada area lahan fasyankes yang rawan longsor
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	- Melaksanakan kegiatan penatausahaan pertanggungjawaban dan pelaporan anggaran pendapatan dan belanja BLUD di Puskesmas Se-Kabupaten Lampung Barat dengan jumlah peserta 45 orang dimana masing-masing Puskesmas mengirimkan 3 orang terdiri Kasubbag TU, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran BLUD. - Kegiatan peningkatan pelayanan BLUD di 15 Puskesmas

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Detail Khusus Sub Kegiatan Tahun 2024
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (RSUD AU)	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD, pelayanan kesehatan yang bersumber dana BLUD
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
1.02.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasaran Pendukungnya	Pembangunan Rumah Sakit Pratama Tipe D Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
1.02.02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Pembangunan fasilitas kesehatan lainnya
1.02.02.2.01.04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Pembangunan Rumah Dinas Untuk Tenaga Kesehatan di Puskesmas Kebun Tebu 3 unit, Air Hitam 1 unit, Buay Nyerupa 1 unit dan Lombok 3 unit
1.02.02.2.01.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit (RSUD AU)	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit berdasarkan pemeliharaan gedung maupun diluar gedung
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Rehabilitasi berat Puskesmas Sekincau agar menyesuaikan 14 Puskesmas lainnya yang sudah sesuai prototyfe Kementerian Kesehatan
1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Berkala di Puskesmas Pembantu di Tebaliokh, Luas, Betung, Rowo Rejo, Mekar Sari dan Sumber Alam
1.02.02.2.01.11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Berkala Rumah Dinas Tenaga Kesehatan di Puskesmas Liwa,Kebun Tebu, BNS dan Buay Nyerupa
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan (RSUD AU)	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan berdasarkan pemeliharaan rumah medis, rumah paramedis
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan Puskesmas Keliling Roda Dua 15 Unit untuk tenaga promkes di 15 Puskesmas

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Detail Khusus Sub Kegiatan Tahun 2024
	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RSUD AU)	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan , Penggadaan gedung yang mendukung pelayanan kesehatan RS
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan prasarana air bersih Pustu tri mulyo, paving block Puskesmas BNS, Cipta Waras dan Kembahang, Pagar Puskesmas Liwa, Kenali, Sumber Jaya, Gedung Surian, sekincau, Srimulyo dan Fajar Bulan dan Solar cell Puskesmas Batu Brak
	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RSUD AU)	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan melalui Pengadaan instalasi pendukung palayanan kesehatan RS
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang untuk Puskesmas Liwa, Buay Nyerupa, Pagar Dewa, Air Hitam, Batu Brak, Sumber Jaya dan Sri Mulyo
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasyankes (RSUDAU)	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Sebagai penunjang pelayanan RS
1.02.02.2.01.16	Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin	Pengadaan obat-obatan pelayanan kesehatan dasar juga vaksin (kecuali vaksin rutin) berdasarkan RKO tahun berjalan, pertemuan penyusunan RKO dengan tim RKO terpadu Dinkes (18 org) dan pertemuan penyusunan RKO dengan Apoteker/pengelola farmasi Puskesmas (15 org), perjadiin monev ke Puskesmas
	Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin (RSUD AU)	Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin, Penyeidaan Bahan habis pakai guna pelayanan penanganan covid-19
1.02.02.2.01.17	Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai	Pengadaan bahan habis pakai untuk pelayanan kesehatan dasar berdasarkan Rencana Kebutuhan Bahan Habis Pakai tahun berjalan, pertemuan penyusunan RKBHP dengan tim RKBHP terpadu Dinkes (18 org) dan Apoteker/pengelola farmasi Puskesmas (15 org)
	Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai (RSUD AU)	Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai, Penyeidaan Bahan habis pakai guna pelayanan penanganan covid-19
1.02.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RSUD Alimuddin Umar)	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan, guna pemeliharaan gedung
1.02.02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RSUD AU)	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RSUD Alimuddin Umar)

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Detail Khusus Sub Kegiatan Tahun 2024
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kalibrasi rutin berkala alat kesehatan di 15 Puskesmas
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RSUDAU)	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dilakukak untuk memelihara/mengganti suku cadang alat kesehatan
1.02.02.2.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obt, Vaksin, BMHP , Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Pendistribusian Obat, Vaksin dan BMHP dari Kabupaten ke seluruh Puskesmas di Kabupaten Lampung Barat
1.02.02.2.01.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar melalui Pendekatan Keluarga	Terdiri dari Pertemuan Koordinasi Teknis Terintegrasi lintas program/lintas sektor puskesmas (2 kali, dengan jumlah peserta 55 orang), Pertemuan Analisis hasil PIS-PK terintegrasi lintas program di tingkat Kab/Kota (2 kali pertemuan daring dengan jumlah peserta 20 orang, 2 kali pertemuan offline dengan jumlah peserta 30 orang), Pelaksanaan Kunjungan Keluarga dan Intervensi awal dan Pelaksanaan intervensi lanjut termasuk perkesmas dalam rangka intervensi hasil PIS-PK (68.276 keluarga)
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM & UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyediaan paket persalinan sebanyak 350 paket, Pengadaan Buku KIA sebanyak 2900 buah , Dana Hibah Profesi IBI sebanyak 1 (satu) paket, Pendataan sasaran ibu hamil sebanyak 1675 orang, deteksi resiko tinggi ibu hamil 335 orang, penyeliaan fasilitatif 2 kali, pertemuan sosialisasi program dan monitoring evaluasi program di Kabupaten sebanyak 8 kali
1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Ibu Bersalin	Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran dan operasional RTK sebanyak 13 buah, Makan Minum Ibu Hamil dan pendamping yang tinggal di RTK sebanyak 1200 kali, Biaya transportasi rujukan ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebanyak 742 kali rujukan
1 02 02 2.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk kunjungan rumah pada bayi baru lahir sebanyak 4.275 kali kunjungan untuk 15 puskesmas selama satu tahun, dan satu kali kunjungan terdiri dari 1 orang tenaga kesehatan dan dilaksanakan sebanyak 3 kali untuk satu bayi. Kegiatan yang dilakukan adalah pelayanan neonatal esensial setelah lahir usia 6 jam sampai 28 hari, pemeriksaan kesehatan dengan pendekatan MTBM, pemberian Vitamin K untuk bayi yang lahir tidak di fasyankes dan belum mendapatkan injeksi vitamin K1,

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Detail Khusus Sub Kegiatan Tahun 2024
		Imunisasi hepatitis B untuk bayi <24 jam yang lahir tidak ditolong tenaga kesehatan dan penanganan dan rujukan kasus neonatal komplikasi
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk transportasi untuk tenaga kesehatan dalam upaya pemantauan pertumbuhan dan perkembangan di posyandu yang dilaksanakan di 260 posyandu yang dilaksanakan oleh 3 orang tenaga kesehatan setiap puskesmas selama 9 bulan dengan jumlah sasaran balita adalah 6.350. Dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah penimbangan berat badan, pengukuran panjang/tinggi badan, pemantauan perkembangan melalui pemeriksaan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang, pemberian kapsul vitamin A, dan pemberian imunisasi dasar lengkap, edukasi dan informasi
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia Sekolah Dasar	Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk transportasi untuk tenaga kesehatan dalam upaya pemberian pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar yang meliputi pendataan sasaran anak setingkat usia pendidikan dasar sebanyak orang, pelaksanaan skrining kesehatan yang terdiri dari penilaian status gizi, penilaian tanda vital, penilaian kesehatan gigi dan mulut, penilaian ketajaman indra, dan memberikan tindak lanjut hasil skrining dengan penyuluhan atau rujukan jika diperlukan. Dilaksanakan di 250 Sekolah Dasar, kegiatan selama 1 kali, jumlah tenaga kesehatan 5 orang masing-masing Puskesmas.
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Cetak Buku Saku (1428 Buku),Jumlah Peserta Pertemuan Evaluasi Usia Produktif, (2 kali/thn),Jumlah Peserta Pertemuan Orientasi Upaya Berhenti Merokok/UBM (1 kali/thn) untuk menunjang pelayanan kesehatan pada usia produktif
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia lanjut	Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pertemuan sebanyak 2 kali yaitu 1 kali untuk orientasi penggunaan panduan praktis caregiver lansia sebanyak 45 peserta dan 1 kali panduan pengisian buku Kartu Menuju Sehat lansia dengan jumlah peserta 60 peserta. Selain itu transportasi untuk tenaga kesehatan masing-masing 1 orang perpuskesmas dengan jumlah lansia yang dilakukan pendampingan atau kunjungan rumah sebanyak 150 orang perpuskesmas dengan jumlah total adalah 2250 lansia dan kegiatan pendampingan dilakukan sebanyak 2 kali. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah penetapan sasaran lansia sebanyak 2250 orang, pelayanan edukasi dan pelayanan skrining yang meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut, pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gangguan mental, pemeriksaan gangguan kognitif, pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut, anamnesa perilaku beresiko, memberikan penyuluhan kesehatan dan rujukan jika diperlukan.
1 02 02 2.02 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Belanja Tensi Duduk (117 Unit) Untuk menunjang pelayanan kesehatan penderita hipertensi di fasyankes dan posbindu sesuai standar
1 02 02 2.02 09	Pengelolaan Yankes Penderita Diabetes Melitus	Belanja Bahan Medis Habis Pakai/BMHP Alkohol Swab (497 Kotak),Blood Lancet (498 Kotak),Strip Gula Darah (550 Kotak) untuk menunjang pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus di fasyankes dan posbindu sesuai standar
2 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Penggandaan SDQ (46.130 lbr),Jumlah Penggandaan SRQ-20 (26.000 lbr),Jumlah Peserta Pertemuan Evaluasi ODGJ (2 kali/thn),Jumlah Peserta Pertemuan Posbindu Cerdik Jiwa (1 kali /thn) untuk menunjang pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar.
2 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga tuberkulosis, dengan kegiatan Pertemuan dan Evaluasi Capaian Program TBC dengan Pengelola Program TBC di Puskesmas sebanyak 45 orang, Rapat Penyusunan Rencana Kerja Koalisi Organisasi Profesi (KOPI) TBC. Dengan kegiatan penunjang antara lain belanja ATK, Bahan Komputer, Bahan cetak &Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Detail Khusus Sub Kegiatan Tahun 2024
		&Luar Daerah.
2 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Risiko Teronfeksi HIV	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Risiko Teronfeksi HIV, dengan kegiatan Pertemuan dan Evaluasi Capaian Program HIV dengan Pengelola Program TBC di Puskesmas sebanyak 45 orang. Dengan kegiatan penunjang antara lain belanja ATK, Bahan Komputer, Bahan cetak, dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah, serta belanja modal komputer jinjing/laptop.
1 02 02 2.02 14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Penyediaan ADS (12.000 buah), RDT antigen covid (2.500 buah), insentif pengelola imunisasi (16 orang), Insentif vaksinator covid (501 orang)
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Gizi Masyarakat	Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk Penyediaan Makanan Tambahan untuk ibu hamil miskin sebanyak 625 ibu hamil dan balita miskin sebanyak 3926 balita, kemudian DAK Stunting yang terdiri dari Rencana Aksi 1 sampai dengan Rencana Aksi 8, dan kegiatan pertemuan sosialisasi dan evaluasi program kesehatan gizi masyarakat sebanyak 8 kali pertemuan
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Sosialisasi Aplikasi SIPGAR kepada pengelola program kesehatan olahraga puskesmas 15 orang, evaluasi program kegiatan kesehatan kerja puskesmas 15 orang, perjalanan dinas dalam dan luar daerah dalam rangka monitoring dan konsultasi program
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pemicuan 5 pilar STBM 16 pekon, updating studi environment health risk assessment (EHRA) 68 pekon, koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan melalui cetak dan media (tv,radio,skhu,online)di kabupaten Lampung Barat
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (RSUDAU)	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan, melalui media baik media elektronik, dan media cetak
1 02 02 2.02 19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Pertemuan petugas imunisasi (30 orang), Pertemuan petugas surveilans (30 orang), Perjalanan koordinasi dan konsultasi kegiatan ke Dinkes Provinsi (9 paket), Perjalanan koordinasi dan konsultasi kegiatan ke Kemenkes (1 paket)
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA untuk pelayanan atau pemeriksaan kepada pengguna napza

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Detail Khusus Sub Kegiatan Tahun 2025
	Jiwa dan NAPZA (RSUD AU)	
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Terdiri dari Pelaksanaan Kegiatan P3K (Rutin dan Insidentil), Poskotis Hari raya (2 kali) Idul Fitri (15 hari) & Nataru (10 hari) , Pelaksanaan sunatan massal (150 peserta), Pertemuan Sosialisasi Pelayanan Kesehatan Haji (45 orang), Pemeriksaan kesehatan CJH dan vaksinasi meningitis CJH (1 kali), Hibah PPNI
	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus (RSUD AU)	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus berdasarkan biaya pengobatan tanggungan negara pasien yang tidak memiliki kartu JKN
1.02.02.2.02.24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Pertemuan petugas kesehatan (1 kali), koordinasi dan konsultasi ke Dinkes Provinsi (5 paket), Konsultasi dan Koordinasi Kegiatan ke Kemenkes (2 paket), Pengadaan Kit Peralatan Krisis Kesehatan (7 set)
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Melalui Pertemuan, Sosialisasi dan Evaluasi Capain Program Pentakit Menular 45 orang 2 kali dalam 1 tahun. Dengan kegiatan penunjang antara lain belanja ATK, Bahan Komputer, Bahan cetak, dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah. Belanja APD petugas fogging, Belanja RDT DBD NS, dan belanja bahan kimia pengendalian vektor (Abate dan Insectisida)
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pembiayaan JKN PBI/PBPU Pemda (15820 jiwa), Bayi Baru Lahir (300 jiwa), Subsidi kls III aktif (8000 jiwa), Bimtek JKN ke Puskesmas (15 Puskesmas), Pertemuan Pengelola JKN dan P-Care Puskesmas dua kali sebanyak 30 org.
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (RSUD AU)	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat berdasarkan kepada pasien JKN PBI, Jampersal dan tanggungan negara berupa Makanan Pendamping kepada keluarga pasien diberikan sehari 3 x selama pasien dirawat
1.02.02.2.02.27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Penggandaan Fomulir Assist (30.000 lembar),Perjalanan Dinas Dalam Rangka Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA Di Fasyankes dan Sekolah (6 Paket),Pertemuan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA (1 kali/thn)
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium	Perjalanan dinas ke Wilayah Puskesmas (7 paket), Perjalanan dinas luar daerah (13 paket), komputer jinjing (2 unit)
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Pembinaan kecamatan sehat penilaian kabupaten sehat 5 kecamatan, perjalanan dinas dalam dan luar daerah dalam rangka pembinaan, monitoring dan konsultasi
1.02.02.2.02.30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang melayani konsultasi jarak jauh antar Fasyankes melalui Pelayanan Telemedicine untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas (4 Puskesmas), Terlaksananya Sosialisasi Telemedicine Bagi Petugas di Puskesmas (75 orang)
	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Kesehatan (RSUD AU)	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Kesehatan , penyediaan melalui jarak jauh/konsultasi jarak jauh
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan RS	

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Detail Khusus Sub Kegiatan Tahun 2024
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit (RSUD AU)	Operasional Pelayanan Rumah Sakit , Membiayai oprasional kegiatan yang berhubungan dengan managemen RS untuk meningkatkan administrasi pelayanan di RS
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Operasional Puskesmas dan Pustu Se- Kabupaten Lampung Barat yaitu operasional pembayaran Listrik, telpon, gaji satpam, gaji clening service dan pemeliharaan gedung Puskesmas dan Pustu
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Operasional kantor UPT IFK, Operasional kendaraan dinas dan lapangan, pengambilan obat, vaksin dan BMHP ke Propinsi dan Honor tenaga kebersihan dan keamanan UPT IFK
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Terdiri dari Peningkatan dan Penilaian Mutu Eksternal (3 kali), Workshop Pendukung Akreditasi Puskesmas (1 Kali Pertemuan dengan jumlah peserta 30 orang), Peningkatan dan penilaian mutu eksternal/ Survey re Akreditasi (1 kali), Pertemuan Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas (12 kali dengan jumlah peserta 40 orang), Pertemuan Lokakarya Mini Lintas Sektor (4 kali dengan jumlah peserta 70 orang)
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota (RSUD AU)	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota, Kegiatan penilaian mutu pelayanan RS oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit
1.02.02.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Operasional Tim Ambulan Hebat Kecamatan (15 Kecamatan), Operasional PSC 119 (1 Unit), Terlaksananya Pembinaan Tim Ambulan Hebat Kecamatan (15 Kecamatan), Terintegrasi nya Ambulans PSC 119 dengan RSAU Liwa, Jumlah Tim Ambulan Hebat Mendapatkan Pelatihan (80 orang), PSC 119 Memiliki call center 119 dan terintegrasi dengan NCC Kemkes (2 paket)
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Pengelolaan Data dan Informasi dilaksanakan dalam bentuk penyusunan Profil Kesehatan
	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan (RSUDAU)	Pengelolaan Data dan Informasi dilaksanakan dalam bentuk penyusunan Profil Kesehatan
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan berbasis elektronik terpadu
1.02.02.2.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Pengadaan Komputer/Laptop, Server, dan perangkat lunak serta langganan jaringan internet
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas	

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Detail Khusus Sub Kegiatan Tahun 2024
	Pelayanan Kesehatan Tingkat Kabupaten/Kota	
1 02 02 2.04 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit kelas C, D & Fasilitas kesehatan lainnya	Pendampingan, visitasi dan pemberian rekomendasi perizinan Rumah Sakit Pratama Tipe D sesuai dengan Permenkes 14 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan berusaha berbasis Risiko Sektor Kesehatan
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Pelaksanaan Pengukuran Indikator Nasional Mutu dan Indeks Keselamatan Pasien
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan (RSUDAU)	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan , melalui palatihan kepada tenaga fungsional tenaga kesehatan
1.02.02.2.04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Yankes Rujukan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Kabupaten Lampung Barat (15 Upt Puskesmas), Terlaksananya pertemuan operator sistrute di Kabupaten (45 org)
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
1.02.03.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	
1 02 03 2.01 01	Pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan	Pelayanan pemberian rekomendasi surat izin praktik bagi tenaga kesehatan yang bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan serta visitasi Praktik Mandiri yang akan diterbitkan secara online melalui aplikasi perizinan PTSP Kabupaten Lampung Barat
1 02 03 2.01 02	Pembinaan & Pengawasan Tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik nakes	Pembinaan dan Pengawasan perizinan praktik tenaga kesehatan baik yang bekerja di fasyankes dan praktik mandiri di wilayah Kabupaten Lampung Barat
1.02.03.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	
1 02 03 2.02 01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Upaya penetapan jenis, jumlah, kualifikasi, dan distribusi tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan serta upaya yang meliputi pendidikan tenaga kesehatan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan kesehatan. Pemerataan SDM kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dilakukan melalui penugasan khusus tenaga

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Detail Khusus Sub Kegiatan Tahun 2024
		kesehatan berbasis tim (Tim Nusantara Sehat) atau individual di Puskesmas Terpencil dan sangat terpencil. Pendayagunaan SDMK bertujuan dapat didistribusikan dan dimanfaatkannya SDM Kesehatan sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia kesehatan sesuai standar	Pembayaran gaji tenaga kesehatan PTDD/TKDDokter 15 orang (Dokter Gigi dan Dokter Umum), Administrasi: 1 orang, Analis: 4 orang, Bidan Desa: 64 orang, Bidan: 16 orang, Farmasi: 1 orang, Kesehatan Lingkungan: 2 orang, Kesehatan Masyarakat: 2 orang, Perawat Gigi: 4 orang, Tenaga Perawat: 25 orang, masyarakat mendapat beasiswa pendidikan dokter: 15 orang)
	Pemenuhan Kebutuhan SDM Kesehatan sesuai standar (RSUDAU)	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia kesehatan sesuai standar , pemberian insentif diberikan kepada tenaga fungsional medis /non medis dan instalasi penunjang
1 02 03 2.02 03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia kesehatan	Untuk mempertahankan dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia kesehatan diperlukan upaya pembinaan dan pengawasan mutu sebagai bagian dari pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan. Pembinaan dan pengawasan mutu SDM Kesehatan juga ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat sebagai pelaku pembangunan kesehatan dan konsumen pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan itu sendiri. Pembinaan dan pengawasan mutu SDM Kesehatan dilakukan dengan melaksanakan standardisasi, sertifikasi dan lisensi,dengan meningkatkan Kerjasama dengan pemangku kepentingan lainnya seperti Organisasi Profesi Kesehatan, dan pemerintah daerah
1.02.03.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Tekhnis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
1 02 03 2.03 01	Pengembangan Mutu dan peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi melalui pelatihan tenaga kesehatan didasarkan atas kajian kebutuhan pelatihan aparatur kesehatan berbasis data dan informasi pelatihan aparatur kesehatan yang akurat dan tepat waktu, serta memperhatikan penggunaan metodologi dan teknologi pelatihan yang inovatif, kreatif dan tepat guna dengan menerapkan prinsip peningkatan mutu yang berkesinambungan
1.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat	

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Detail Khusus Sub Kegiatan Tahun 2024
	Tradisional (UMOT)	
1.02.04.2.01.01	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Rapat/ pertemuan/ koordinasi terkait pemutakhiran data sarana Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, Optikal, dan UMOT. Peserta pertemuan sebanyak 40 orang, terdiri dari 10 orang dari Dinkes (Kadis, Sekretaris, Kabid SDK, Subkoor Farmakmin, Pengelola Farmakmin, Subkoor SDMK, Subkoor Sarpras Alkes, Subkoor JKN Kestrad, Subag Perencanaan, Staf bidang SDK) dan 30 orang dari 15 Puskesmas (Kepala Puskesmas dan Pengelola Program)
1.02.04.2.01.02	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Perjalanan dinas dalam rangka pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan ke minimal 28 sarana (23 Apotek, 2 Toko Obat, 1 Toko Alkes, 2 Optikal)
1.02.03.2.02	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
1.02.04.2.02.01	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Bimbingan teknis penyuluhan keamanan pangan bagi 80 orang pemilik/ penanggung jawab IRTTP yang ingin mendapatkan SPPIRT, rapat penerbitan SPPIRT, rapat pengkajian ulang SPPIRT, perjalanan dinas dalam rangka pengawasan pre market IRTTP
1.02.03.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat	

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Detail Khusus Sub Kegiatan Tahun 2024
	Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	
1.02.03.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Monitoring dan evaluasi, koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
1.02.03.2.05	Penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	
1.02.03.2.05.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	
1.02.03.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada produksi dan produk makanan minuman IRT	
1.02.04.2.06.01	Sub Kegiatan Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman IRT yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Sampling terhadap 27 produk IRTTP untuk dilakukan pengujian keamanan pangan, perjalanan dinas dalam rangka pengawasan post market ke minimal 60 sarana IRTTP, pertemuan untuk membahas hasil pengawasan label dan iklan pangan dengan KPID/pakar iklan, pertemuan desk CAPA dengan pelaku 15 usaha IRTTP

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Detail Khusus Sub Kegiatan Tahun 2024
1.02.04.2.06.02	Subkegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Rapat/ pertemuan/ koordinasi terkait pemutakhiran data sarana Industri Rumah Tangga Pangan serta Produk Pangan Industri Rumah Tangga dengan peserta 40 orang. Peserta rapat sejumlah 10 orang dari Dinkes (Kabid SDK, Subkoor Farmakmin, Pengelola Farmakmin, Staf Bid. SDK, dan 6 orang tenaga PKP/DFI Dinkes), 30 orang dari Puskesmas (Kepala Puskesmas dan PKP/DFI Puskesmas)
1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan PSM dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kab /Kota	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat	Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat dengan Sosialisasi program posyandu dengan peserta 75 orang, KIE DAN Bimtek Keamanan Pangan dengan peserta 250 orang, kegiatan BOK baik oleh kabupaten maupun puskesmas, perjalanan dinas ke kecamatan/puskesmas
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif, Preventif Tingkat Daerah Kabupaten Kota	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Pada Masyarakat Dengan pertemuan peserta 150 orang dari 15 kecamatan dan perjalanan dinas ke 15 kecamatan serta kegiatan BOK oleh kabupaten maupun Puskesmas di kabupaten lampung barat
1.02.05.2.02.02	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada Masyarakat melalui pembinaan secara intensif kepada 300 keluarga terpilih, cetak leaflet, stiker dan spanduk, makan dan minum, batuan transport peserta pendukung kegiatan serta perjalanan dinas dalam wilayah di Kabupaten Lampung Barat

BAB V
PENUTUP

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 difokuskan untuk menjawab isu-isu strategis dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya bidang kesehatan. Fokus Prioritas Pembangunan Kesehatan tahun 2025 serta di fokuskan pada upaya pencapaian SPM, Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Penurunan Angka Kematian Neonatal (AKN) dan Penanggulangan stunting, Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak, Pengendalian penyakit serta beberapa permasalahan kesehatan terkait dengan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan baik di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) di Kabupaten Lampung Barat, dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).

Penyusunan Renja PD Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat tahun 2025 tidak terlepas dari arah kebijakan yang telah dirumuskan dalam RPD Tahun 2023-2026. Hasil penyusunan Renja PD ini diharapkan dapat dimanfaatkan dalam proses penyusunan anggaran (RKA) tahun 2025, serta sebagai bahan evaluasi selanjutnya. Komitmen dari berbagai pihak terkait untuk konsisten dalam pelaksanaan program dan kegiatan merupakan hal terpenting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan program/kegiatan. Rencana Kinerja Bidang Kesehatan dipergunakan sebagai dasar dan acuan dalam penyusunan berbagai kebijakan, pedoman dan arahan penyelenggaraan pembangunan kesehatan serta pembangunan berwawasan kesehatan.

Tujuan utama pembangunan kesehatan adalah menciptakan taraf hidup sehat bagi masyarakat maupun lingkungan. Hal ini dapat terwujud apabila didukung oleh seluruh rencana program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dijalankan dan dilaksanakan dengan baik dan benar, sehingga segala hambatan dan tantangan dapat dihadapi bersama.

Demikianlah Rencana Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat tahun 2025 ini kami buat, dan dengan dilaksanakannya Program dan Kegiatan yang menjadi prioritas di tahun 2025 diharapkan dapat mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan Kabupaten Lampung Barat serta kebijakan pemerintah di bidang kesehatan.

Liwa, 22 Januari 2024
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lampung Barat



Dr. WIDYATMOKO KURNIAWAN, Sp.B
Pembina TK INIP. 19700626 200501 1 007

